

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENYELENGGARAAN TUGAS KEPALA DESA BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DESA KOTA BANGUN KECAMATAN TAPUNG HILIR
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Sarjana Strata Satu (S1)
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



RITA ENDAH PRATIWI
NPM : 147310543

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Rita Endah Pratiwi
NPM : 147310543
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.I)
Judul Skripsi : Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Tahun 2020

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferhensif.

Pekanbaru, 29 Desember 2021

Pembimbing I

Pembimbing II,


Drs. H. Zaini Ali, M.Si


H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Rita Endah Pratiwi
NPM : 147310543
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Tahun 2020

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 29 Desember 2021

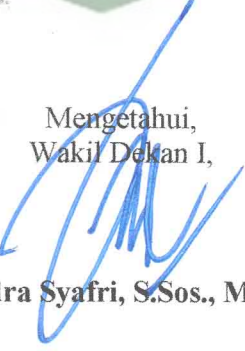
Ketua, Sekretaris,


H. Panca Setyo Prihatin, S.IP.,M.Si


Septa Juliana, S.Sos, M.Si

Anggota,

Dita Fisdian Adni, S.IP,M.IP

Mengetahui,
Wakil Dekan I,

Indra Syafri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0021 /UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- imbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- ingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- perhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- etapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Rita Endah Pratiwi
N P M : 147310543
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : **Penyelenggaraan Tugas Kepala desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Tahun 2020.**

Struktur Tim :

1. Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Septa Juliana, S.Sos., M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 22 Desember 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK : 080102337



Disampaikan Kepada :
Yth. Bapak Rektor UIR
Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
Yth. Ketua Prodi.....
A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rita Endah Pratiwi
NPM : 147310543
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Tahun 2020.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh Karena itu dapat di sahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 29 Desember 2021
An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua,


H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si


Septa Juliana, S.Sos, M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,


Indra Syafri, S.Sos., M.Si

Ketua,
Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim.....

Tiada kata dan ucapan yang dapat penulis ucapkan selain puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-nya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan bisa bermanfaat bagi diri penulis, keluarga serta masyarakat dan semoga diridhoi oleh Allah SWT, sholawat beserta salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada junjungan alamyakni Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah di jalan islam. Dan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yaitu dengan judul :

“Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Tahun 2020”

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya atas segala dukungan, bantuan, dan bimbingan dari beberapa pihak selama proses studi dan juga selama proses skripsi ini. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan universitas islam Riau ini .
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. Selaku ketua program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Drs. H. Zaini Ali, M.Si. Selaku Pembimbing I dan Bapak H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam skripsi ini

5. Seluruh staf, karyawan\{ti tata usaha (TU) fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik serta Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian usulan penelitian ini.
6. Saya ucapkan terimakasih terkhusus dan teristimewa untuk kedua orangtua yang sangat penulis Cintai Sayangi yaitu Ayahanda “WASMIN” dan Ibunda ‘SURYANTI” yang sangat berjasa didalam kehidupan penulis, Yang berkorban demi keberhasilan penulis mencapai cita-cita, yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat tiada henti kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Saya ucapkan terimakasih juga untuk kakak dan abang tersayang yaitu kak Eva Juita Arisandi, bang Herdi Anto Saputra, kak Endang Sriasih Dewi , bang Roni Permana Putra, kak Maya Peristiwa Ningsih yang telah memberikan support dan doa kepada penulis sampai skripsi ini selesai.
8. Kepada teman-teman yang saya sayangi fitri eka novianty, dewi cita rani, rafida uyun, jusmi sumatri, dan semua pihak yang turut membantu dan memberikan semangat kepada penulis yang dengan keterbatasan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun penulisan. Akhirnya penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca

Pekanbaru, 16 November 2021

Rita Endah Pratiwi



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

	Hlm
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	15
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	16
2.1. Deskripsi Teori	16
2.2.1. Konsep Ilmu Pemerintahan	16
2.2.2. Konsep undang-undang desa.....	20
2.2.3. Konsep peranan	27
2.2.4. Konsep Pemberdayaan	31
2.2.5. Konsep organisasi.....	35
2.2.6. Konsep pemimpin.....	37
2.2.7. Konsep manajemen.....	46

2.2.8. Konsep sumber daya manusia	46
2.3. Kerangka Pikir	52
2.4. Konsep Operasional.....	52
2.5. Operasional Variabel	55
BAB III METODE PENELITIAN	58
3.1. Tipe Penelitian	58
3.2. Lokasi Penelitian	58
3.3. Populasi dan Sampel	59
3.4. Jenis dan Sumber Data	60
3.5. Teknik Pengumpulan Data	59
3.6. Teknik Analisa Data	61
3.7. Jadwal Kegiatan Penelitian	63
3.8. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	63
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar.....	64
B. Gambaran Singkat Desa Kota Bangun.....	67
C. Struktur Organisasi Desa kota bangun.....	70
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	71
B. Hasil Penelitian Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar	75

C.	Hambatan-hambatan Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar	109
----	--	-----

BAB VI : PENUTUP

A.	Kesimpulan	111
B.	Saran	111

DAFTAR KEPUSTAKAAN	113
---------------------------------	-----



DAFTAR TABEL

Tabel		Hlm
I.1	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Di Desa SP Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar	10
	Penelitian terdahulu	51
11.1	Operasional variable	55
111.1	Keadaan populasi dan sample penelitian pada kantor desa kota bangun.....	60
111.1	Jadwal kegiatan penelitian	63
V.1	Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin mengenai Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar	72
V.2	Distribusi Responden mengenai Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.....	73
V.3	Distribusi Responden Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan mengenai Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.....	74
V.4	Tanggapan Responden Kaur Umum dan Staf Desa Berdasarkan indikator Perencanaan	77

V.5	Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Terhadap Indikator Perencanaan.....	79
V.6	Tanggapan Responden Kaur Umum Dan Staf Desa Berdasarkan Pemimpin Pengorganisasian.....	84
V.7	Tanggapan Responden Masyarakat Berdasarkan Pemimpin Sebagai Wakil Dan Juru Bicara.....	86
V.8	Tanggapan Responden Kaur Umum dan Staf Desa Berdasarkan Penggerakan.....	91
V.9	Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Penggerakan.....	93
V.10	Tanggapan Responden Kaur Umum dan Staf Desa Berdasarkan Indikator Pengawasan.....	98
V.11	Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Pengawasan	100
V.12	Rekapitulasi Tanggapan Responden Kaur Umum dan Staf Desa, Mengenai Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.....	104
V.13	Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hlm
II.1 Kerangka Pikir Tentang penyelenggaraan tugas kepala desa bidan pemberdayaan masyarakat didesa kota bangun kecamatan tapung hilir kabupaten Kampar	52
G. Struktur Organisasi Desa Kota bangun	70



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta komprehensif skripsi Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rita Endah Pratiwi
NPM : 147310543
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Usulan Peneliti : Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Usulan Penelitian ini peserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya Plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Usulan Penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 November 2021

Pelaku Pernyataan,



Rita Endah Pratiwi

Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

ABSTRAK

OLEH : Rita Endah Pratiwi

Kata Kunci : Fungsi, Kepemimpinan, Kepala Desa

Subtansi mengenai Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Fungsi kepemimpinan Kepala Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan untuk mengetahui faktor pendukung dan pengahambat Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori Fungsi manajemen yakni dengan indikator pemimpin Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan dan Pengawasan. Metode penelitian ini adalah *survey deskriptif* dengan menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 585 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *teknik random sampling* untuk pegawai dan juga masyarakat desa kota bangun tersebut, sampel dalam penelitian ini penulis tetapkan sebanyak 68 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar di kategorikan belum berjalan dengan baik dan maksimal. Hal ini masih ditemui faktor-faktor penghambat yaitu sarana dan prasarana yang kurang dijaga atau dirawat, hubungan yang kurang terjalin dengan baik, kurang memiliki komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, serta kurangnya peranan kepala desa dalam menyelesaikan konflik.

**Implementing The Duties Of The Village Head For Community
Empowerment In Kota Bangun Village, Tapung Hilir District, Kampar
Regency**

ABSTRACT

BY : Rita Endah Pratiwi

Keywords: Function, Leadership, Village Head

Substance regarding the Implementation of the Duties of the Village Head for Community Empowerment in Kota Bangun Village, Tapung Hilir District, Kampar Regency. The purpose of this study was to determine the leadership function of the Kota Bangun Village Head, Tapung Hilir District, Kampar Regency and to determine the supporting and inhibiting factors of the Leadership Function of the Kota Bangun Village Head, Tapung Hilir District, Kampar Regency. Planning, Organizing, Mobilizing and Monitoring. This research method is a descriptive survey using quantitative methods. The population in this study was 585 people. The sampling technique in this study used a random sampling technique for employees and also the urban village community, the sample in this study the authors set as many as 68 people. The results showed that the implementation of the duties of the Village Head for Community Empowerment in Kota Bangun Village, Tapung Hilir District, Kampar Regency was categorized as not running well and optimally. There are still inhibiting factors, namely facilities and infrastructure that are not maintained or cared for, relationships that are not well established, lack of good communication with various parties, and the lack of the role of village heads in resolving conflicts.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah alat (agency) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama dalam mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya.

Tujuan negara republik Indonesia sebagai tecantum didalam pembukaan undang-undang dasar 1945 ialah untuk membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan social dengan berdasakan kepada: ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 18 undang-undang dasar antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk yang susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Untuk melaksanakan pasal 18 undang-undang 1945, maka dibentuklah undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dengan hadirnya undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah maka telah memberikan harapan besar bagi masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi disetiap daerah. Undang-undang ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Berdasarkan pasal 9 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan absolut dan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan tersebut yaitu:

- a. Urusan pemerintah absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintah konkuren yang diserahkan daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
- c. Urusan pemerintah umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pemerintahan desa bertugas dan berkewajiban terhadap seluruh kegiatan pemerintahan penyelenggaraan desa adalah kepala desa. Adapun tugas dan kewajiban kepala desa adalah salah satunya memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karna itu kepala desa dalam menyelenggarakan

pemerintahan desa tidak mungkin dilakukan sendiri, kepala desa juga perlu partisipasi dari semua lapisan masyarakat untuk ikut mensukseskan program pembangunan atau kegiatan yang ada didesa. Peran kepala desa sangat diperlukan dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program-program desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa salah satunya ditunjuk dengan cara pendekatan terhadap warga.

Desa tumbuh dari komunitas yang menyelenggarakan urusannya sendiri, kemudian diakui oleh pemeritahan kolonial sebagai kesatuan masyarakat hukum, dan akhirnya berkembang menjadi kesatuan masyarakat hukum adat. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki lembaga yang mapan dan ajeg yang mengatur perkehidupan masyarakat desa yang bersangkutan. Berdasarkan pendapat Teer Haar, masyarakat hukum adat memiliki tiga komponen yaitu:

1. Sekumpulan orang yang teratur
2. Mempunyai lembaga yang bersifat ajeg dan tetap
3. Memiliki kekuatan yang mengurus harta benda

Dalam peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman teknis peraturan didesa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fungsi pemerintahan baik pusat, daerah, maupun desa adalah memberikan pelayanan kemasyarakat. Pelayanan tersebut diantaranya terdiri atas pelayanan public, pelayanan publik yang dimaksud ialah berhubungan dengan pelayanan yang masuk kategori sektor publik, sektor publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada publik, publik yaitu sejumlah orang yang mempunyai kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai dan norma yang mereka miliki. Dalam konteks pemerintahan desa, publik disini maksud nya adalah sejumlah penduduk atau rakyat yang tinggal dalam wilayah/desa dengan mempunyai pikiran, perasaan, dan kepentingan yang sama terhadap keberadaan pemerintahan desa berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan, perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat indonesia. Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa pada pasal 1 ayat 1 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau tidak hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014).

Tugas, wewenang dan kewajiban kepala desa sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 yang berbunyi ;

1. Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Desa berwenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan peraturan daerah;
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-sebesar kemakmuran Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima perampasan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara Partisipatif;
 - n. Mewakili desa di dalam dan luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan; dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan desa, penetapan peraturan didesa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan serta penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, social budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna;
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Selanjutnya lagi pada Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (4) berbunyi, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa ;
- c. Memelihara ketentraman dan katertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundangan-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan Demokrasi dan berkeadilan Gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan desa yang akuntabel, Transparan, profesional, efektif dan efesien, bersih, serta bebas kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;

- n. Memberdaya masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Selanjutnya berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 yaitu RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 bertujuan untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, strategi dan arah kebijakan serta program prioritas yang hendak diwujudkan sesuai dengan situasi, kondisi dan potensi dalam jangka waktu 3 tiga tahun kedepan.

Sebagai instansi Pemerintahan Kabupaten Kampar di beri kewenangan untuk membuat Kebijakan tentang Desa, maka dari itu Kabupaten Kampar mengeluarkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Kepala desa merupakan representasi pemerintah desa. Ia menjadi actor penting dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Desa diatur secara detail dalam UU Desa. Semangat UU desa menempatkan kepala desa bukan kepanjangan tangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Kepala desa harus mengakar dengan masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tugas kepala desa bukan sekedar menyelenggarakan pemerintahan desa, tetapi ia juga melakukan pemberdayaan kepada masyarakat desa.

Status Desa adalah satuan pemerintahan dibawah Kabupaten atau Kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya dibawah camat. Kelurahan

hanyalah wilayah kerja yang lurah dibawah camat yang tidak mempunyai hak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan Desa adalah atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Desa Kota Bangun adalah nama suatu wilayah di kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, provinsi Riau. Secara geografis Desa Kota Bangun merupakan daerah dataran rendah yang didominasi dan dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit. Desa Kota Bangun memiliki luas 2343,49 Ha, yang terdiri dari daerah pemukiman dan perkebunan kelapa sawit. Jumlah Penduduk Desa Kota Bangun berjumlah 5.095 jiwa yang terdiri dari 2.432 jenis kelamin perempuan dan 2.664 jenis kelamin laki-laki dari 1.226 kepala keluarga. Itulah alasan Peneliti meneliti di Desa Kota bangun dikarenakan Desa Kota Bangun merupakan desa maju, akan tetapi Program Pemberdayaan PKK yang seharusnya ada di daerah maju tetapi justru tidak berjalan efektif di Desa Kota Bangun tersebut.

Desa Kota Bangun termasuk Desa Berkembang, Desa Berkembang menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Berdasarkan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (4) salah satunya yaitu memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa. Lembaga pemberdayaan (LPM) adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa dan pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Akan tetapi bisa dilihat dari Desa Kota Bangun, tentunya masih ada permasalahan Peranan Kepala Desa khususnya mengenai kewajiban kepala desa dalam memberdayakan masyarakat desa dan kelembagaan di desa, sehingga dari permasalahan tersebut pencapaian tujuan dari Desa Kota Bangun yang di inginkan akan terhambat, hal ini juga dapat terjadi karena respon dari pemerintah tidak cepat dan masih adanya ketidaktahuan tugas antar lembaga pemerintah desa masing-masing.

Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2016 yaitu upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan pemberdayaan, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kota Bangun dan Kondisi masyarakat, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Tahun 2019-2020

No	Tahun	Jenis Kegiatan	Jumlah
1.	2020	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	20 orang
2.	2020	Pengadaan mesin jahit, bordir dan mesin pinggir	20 buah
3.	2019	Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	30 Orang
4.	2020	Karang Taruna	10 Orang
5.	2019	Kelambu nyamuk	5 Orang

Sumber : Kantor Kepala Desa Kota Bangun.

Diadakannya program pemberdayaan tersebut agar dapat meningkatkan kreatifitas kaum perempuan serta diharapkan dapat menunjang partisipasi perempuan untuk mengikuti kegian PKK dan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, akan tetapi berdasarkan hasil observasi dilapangan, masih belum efektifnya program pemberdayaan tersebut, program tersebut hanya berjalan beberapa bulan saja dan hanya diikuti oleh beberapa orang saja.

Dan berdasarkan data diatas hanya beberapa saja yang sampai saat ini kegiatan atau lembaga yang aktif dalam memberdayakan masyarakat yaitu Bumdes (Simpan Pinjam). Sedangkan karang taruna, kursus menjahit, kelambu nyamuk dan juga PKK sudah tidak aktif lagi dalam memberdayakan masyarakatnya. Dan hanya kegiatan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) untuk

Simpan Pinjam saja yang berhasil dijalankan. Dan kegiatan tersebut sudah tertuang didalam RPJMD desa Kota Bangun serta anggaran biaya untuk kegiatan tersebut berasal dari Dana Desa.

Hal ini dikarenakan fungsi kepemimpinan khususnya mengenai kurangnya kerjasama kepala desa dalam memberdayakan masyarakat desa dengan kelembagaan di desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga dari permasalahan tersebut pencapaian tujuan dari Desa Kota Bangun yang di inginkan akan terhambat, hal ini juga dapat terjadi karena respon dari pemerintah tidak cepat dan masih adanya ketidaktahuan tugas antar lembaga pemerintah desa masing-masing sehingga program-program yang telah dibuat menjadi tidak efektif.

Mardikanto (2012:27) mengemukakan bahwa “pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan individu, kelompok dan masyarakat luas yang memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya termasuk sumberdaya yang terkait dengan pekerjaan dan aktivitasnya”. Berdasarkan teori tersebut peneliti bahwa pemberdayaan dalam kehidupan masyarakat berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya lingkungan.

Menurut Parsons,et.al. 1994 (dalam Suharto, 1997,h.210-224), pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadiankejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi

kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Kepala desa memiliki fungsi penting dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan harus mampu merencanakan dan membuat suatu keputusan yang nanti dipergunakan dalam melaksanakan roda Pemerintahan Desa, sehingga Pemerintahan Desa dapat berjalan sebagai mana mestinya. Membuat keputusan Kepala Desa juga harus mempertimbangkan pendapat-pendapat dari aparatur dan masyarakatnya, agar keputusan yang dibuat Kepala Desa dapat diterima bersama.

Badan permusyawaratan Desa merupakan Badan permusyawaratan ditingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan ditingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan atau Badan Permasyarakatan desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Hasil musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituang dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permasyarakatan Desa dan

Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa, peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan Desa merupakan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembangunan Desa.

Peran aktif dari kelompok-kelompok masyarakat di Desa untuk membentuk usaha bersama atas kepentingan bersama pula diselenggarakan secara kekeluargaan yaitu koperasi, namun apabila untuk menunjang berjalannya kegiatan yang ada pada desa Kota Bangun harus juga didukung dengan sumber daya manusia yang berada pada desa Kota Bangun supaya setiap kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan maksimal.

Adapun fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan berdasarkan pengamatan peneliti maka dapat diperoleh masalah-masalah sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya Kepala Desa mengenai program yang akan dijalankan dan masih adanya ketidak tahuan tugas antar lembaga pemerintah desa masing-masing sehingga program-program yang telah dibuat menjadi tidak efektif, contohnya seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
2. Masih belum optimalnya tujuan dari Program Pemberdayaan kesejahteraan Sosial (PKK) sehingga program tersebut tidak dapat berjalan dengan optimal.
3. Masih belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat sehingga kurang berhasil dilakukan, sehingga untuk pemberdayaan 20 anggota PKK tidak

semua peserta mau mengikuti dan mempelajarinya, sehingga ada indikasi anggota PKK kurang memahami menyangkut kegiatan tersebut bagi desa.

Dari fenomena-fenomena diatas, sekalipun bukan gambaran secara umum namun, dapat dilihat bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh kepala desa masih belum optimal ini dikarenakan fungsi kepemimpinan kepala desa mengenai pemberdayaan masyarakat belum berjalan semaksimal mungkin. Berdasarkan fenomena-fenomena yang dikemukakan diatas maka ditetapkan judul penelitian ini yaitu **“Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar”**.

A. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan terlebih dahulu bahwa kepala desa selalu memimpin di desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun bukan hanya masyarakat saja yang diberdayakan tetapi aparatur pemerintah di desa Kota bangun juga harus diberdayakan agar apapun yang direncanakan bisa bersama-sama direalisasikan oleh pemerintah dan masyarakat, oleh karena itu peneliti merumuskan suatu permasalahan yaitu : **“Apakah Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Sudah Terlaksana Dengan Baik ?”**.

B. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka tujuan utama penelitian ini adalah : Untuk Mengetahui Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan Pemerintahan Desa antara teori yang praktik yang sesungguhnya
- b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan mahasiswa khususnya tentang Pemerintah desa terhadap Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
- c. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa saran atau pemikiran bagi Kepala Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, konsep dan teori sangat diperlukan sebagai landasan atau sebagai tolak ukur dalam mengemukakan maupun menjawab permasalahan penelitian. Sebelum konsep dan teori dalam penulisan ini dibahas, maka akan diawali dengan beberapa konsep dan teori seperti dibawah ini.

1. Konsep Pemerintahan

Syafiie (2011;20) pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Sedangkan menurut Ndraha (2011;5) pemerintahan adalah sebuah system multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa public dan layanan civil.

Musanef (dalam Syafiie, 2008;9) Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsu-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas, dan masyarakat yang berkepentingannya diwakili oleh dinas tersebut.

Sedangkan Syafiie (2011;23) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan

daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Namun menurut Manan (dalam Chaidir 2008;85) menguraikan bahwa pemerintahan diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi. Chaidir (2008;84) kata pemerintahan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam arti luas pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan, memelihara keamanan dan meningkatkan derajat kehidupan rakyat serta dalam menjamin kepentingan negara itu sendiri. Dalam konteks fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif pengertian pemerintah mencakup kesemua fungsi tersebut diatas. Dalam arti sempit hanya menyangkut fungsi eksekutif saja.

Pengertian pemerintahan ditinjau dari tiga aspek, yaitu dari segi kegiatan (dinamika), structural fungsional, dan dari segi tugas dan kewenangan (fungsi). Apabila ditinjau dari segi dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Ditinjau dari segi fungsional, pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara (dalam Surbakti (1992;168-169) lalu ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan negara. Menurut ketiga batasan diatas dapatlah disimpulkan pemerintahan merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan negara (fungsi negara).

Syafiie (2007;4) secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut dibawah ini :

1. Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh,. Yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti perbuatan cara, hal atau urusan dari bahan yang memerintah tersebut.
3. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut. Ewalt (dalam Awang dan Mendra Wijaya, 2012;11) *governance identifies the power dependence involved in the relationships between institutions in collective action. Organization are dependent upon each other for the achievement of collection action, and thus must exchange resources and negotiate shared understandings of ultimate program goals.*

Maksudnya adalah pemerintahan mengidentifikasi ketergantungan daya yang terlibat dalam aksi kolektif. Organisasi tergantung pada satu sama lain untuk pencapaian tindakan kolektif, dan dengan demikian harus ada pertukaran sumber daya dan menegosiasikan pemahaman bersama tentang tujuan program utama (dari organisasi tersebut).

Pemerintah (government) secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani, kubernan atau nahkoda kapal. Artinya menatap kedepan. Lalu “memerintah” berarti melihat kedepan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang ditetapkan (dalam Surbakti, 1992;167-168).

Adapun menurut Apeldoreen (dalam Supriyatno, 2009;22-23) “pemerintah” sekurang-kurangnya memiliki tiga pengertian seperti yang dicatat Utrecht sebagai berikut :

- a. Pemerintah sebagai gabungan semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah dalam arti kata luas. Jadi, yang meliputi badan-badan

legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemerintahan dalam pengertian ini disebut penguasa.

- b. Pemerintah sebagai badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah di wilayah suatu negara. Contohnya raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain.
- c. Pemerintah sebagai organ eksekutif, dalam arti kepala negara bersama-sama dengan menteri-menterinya.

Sedangkan Awang dan Mendra Wijaya (2012;6) *government is body of people that sets and administer public policy, and excercis exsekutive, political, and sovereign power through customs, institutions, and laws within a state.* Maksudnya adalah pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan public. Dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik, dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi, dan hukum dalam sebuah negara.

Selanjutnya, Awang dan Mendra Wijaya (2012;6) pemerintah adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.

Finer (dalam Chaidir, 2008;85) istilah *government* paling sedikit mempunyai empat arti, yaitu :

- a. Menunjukkkan kegiatan atau proses pemerintah, yaitu melaksanakan control atas pihak lain (*the activity of the process of governing*).
- b. Menunjukkan masalah-masalah (hal ikwal) negara dalam mana kegiatan atau proses di atas dijumpai (*states of affairs*).
- c. Menunjukkan orang-orang (maksudnya pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah (*people charged with the duty of governing*).

- d. Menunjukkan cara, metode atau system dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah (the manner, method or system by which a particular society is governed).

2. Konsep Undang-Undang Desa Dan Peraturan Pemerintah Tentang Desa

Dalam undang-undang nomor 06 tahun 2014 desa, yang dimaksud dengan desa pada pasal 1 ayat 1 adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain.

Selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan republik indonesia. (dalam undang-undng nomor 06 tahun 2014).

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 1 ayat 12 menyatakan pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Dalam hal ini personal yang bertanggungjawab dalam pemberdayaan masyarakat di desa Teluk Rhu yaitu Kepala Desa, hal ini sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban kepala desa sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 06 tahun 2014 tentang desa pasal 26 yang berbunyi :

1. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1), kepala desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Menyajukan rancangan peraturan Desa
- c. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBdes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa
- f. Membina perekonomian desa
- g. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif
- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) berbunyi :

Kepala Desa Bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Selanjutnya dalam ayat 2 yaitu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelola keuangan dan aset Desa;
- d. Menetapkan peraturan daerah;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-undnag Nomor 06 Tahun 2014 pasal 26 ayat 3 berbunyi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berhak :

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perliindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Selanjutnya lagi pada UU Desa 2014 pasal 4 berbunyi, dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhineka tunggal ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional,efektif dsn efisien, bersih serta bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme.

- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan;
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Kemudian dalam pasal 27 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, kepala Desa wajib :

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
- c. Memberi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran, dan;
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Lebih lanjut pada pasal UU Desa 2014 pasal 28 ayat 1 dan 2 berbunyi :

1. Kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 4 dan pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan.atau teguran tertulis;
2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan,dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Dalam UU Desa tahun 2014 pasal 29, dinyatakan kepada Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban;
- d. Melakukan tindakan deskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permursyawaratan Desa, anggota Dewan perwakilan Rakyat republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Derah Provinsi atau Dewan Perwakilan Derah Kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Meninggalkan tugas selama 30(tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan dalam UU Nomor 06 tahun 2014 pasal 30 yang berbunyi :

1. Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

3. Konsep Desa

Soetardjo dan Yulianti (dalam Wasistiono dan M. Irwan Tahir, 2007;17) kata “desa” berasal dari Bahasa india yakni “*swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Sedangkan Bintarto (dalam Nircholis, 2011;4) desa adalah suatu perwujudan geografis social ekonomi, politis, dan cultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.

Selanjutnya menurut soenardjo (dalam Nurcholis, 2011;14) desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya: memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat baik karna seketurunan maupun sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, social dan keamanan; memiliki susunan pengurus

yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Sedangkan Nurcholis (2011;4) desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling emengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, social, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota.

Kebanyakan orang memahami desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan peradaban yang lebih terbelakang daripada kota. Biasanya dicirikan dengan Bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relative rendah, maka pencaharian yang umumnya disektor pertanian. Bahkan terdapat kesan kuat bahwa desa merupakan tempat tinggal para petani (dalam Wasistiono dan M. Irwan Tahir,2007;8).

Selanjutnya pengertian desa dapat juga dilihat dari pergaulan hidup, seperti yang dikemukakan Bouman (dalam Wasistiono dan M. Irwan Tahir,2007;8) yang mendefinisikan desa : “sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah social”.

Selain itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang unsur-unsur desa. Menurut Bintarto (dalam Wasistiono dan M. Irwan Tahir, 2007;10) unsur-unsur yang harus ada dalam suatu desa adalah :

- a. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak produktif beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas-batas yang merupakan lingkungan geografis setempat.
- b. Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, penambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat.

- c. Tata kehidupan, dalam arti ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Jadi menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa (rural society).

Secara sosiologis, Boeke (dalam Wasistiono dan M. Irwan Tahir, 2007;13) memberikan gambaran bahwa yang dimaksud dengan desa adalah persekutuan hukum pribumi yang terkecil dengan kekuasaan sendiri, daerah sendiri, dan kekayaan atau pendapatan sendiri.

Selanjutnya Boeke (dalam Wasistiono dan M. Irwan Tahir, 2007;14) mengemukakan bahwa persekutuan hukum pribumi yang terkecil dapat diartikan bahwa didalamnya tercakup pengertian :

- a. Persekutuan hukum adat yang tumbuh dengan sendirinya didalam masyarakat pribumi dan mempunyai dasar tradisional.
- b. Persekutuan hukum, dimana hanya penduduk pribumi atau setidak-tidaknya sebagian besar daripada penduduk pribumi yang menjadi anggota-anggotanya.

Lebih lanjut Maschab (dalam Wasistiono dan M. Irwan Tahir, 2007;14) pengertian sosiologis desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam.

Wiradi (dalam Wasistiono dan M. Irwan Tahir, 2007;16) dari berbagai pengertian desa sebagaimana diatas, maka dapat ditarik ciri desa secara umum :

1. Desa umumnya terletak di atau sangat dekat dekat pusat wilayah usaha tani (sudut pandang ekonomi).

2. Dalam wilayah itu perekonomian merupakan kegiatan ekonomi dominan.
3. Faktor-faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya.
4. Tidak seperti kota ataupun kota besar yang penduduknya sebagian besar merupakan pendatang populasi penduduk desa lebih bersifat terganti oleh dirinya sendiri.
5. Control social lebih bersifat informal dan interaksi antar warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka, dan
6. Mempunyai tingkat homogenitas yang relative tinggi dan ikatan social yang relative lebih ketat daripada kota.

4. Konsep Peranan

Pengertian Peranan Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking.” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.”

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

Pembedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati melalui buku Sosiologi Suatu Pengantar dijelaskan bahwa, peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Sering orang mempunyai pelbagai status sekaligus dan akibatnya pelbagai peranan. Misalnya, seorang ulama dapat merangkap status suami, pengusaha, ketua organisasi. Tiap status mempertemukan dia dengan orang yang berlainan. Selaku ulama ia melayani umat yang beragama, selaku suami ia mempunyai relasi khusus dengan istri dan anak-anaknya, selaku pengusaha ia berhubungan dengan para pelanggan dan wakil-wakil dunia bisnis, dan selaku ketua organisasi dengan para anggotanya. Statusstatus yang dimiliki seseorang secara merangkap disebut dengan "status set" atau seperangkat status.

Relasi-relasi yang timbul dari suatu “status set” mempunyai coraknya sendiri dan mengandung harapan-harapan sendiri. Perilaku sebagai ulama berbeda dari perilaku sebagai suami. Robert Merton memakai istilah *multiple roles* (banyak peranan yang berlain-lainan) untuk semua peranan yang timbul dari “status set.” Misalnya, ulama tadi mempunyai bermacam-macam peranan yang berkaitan dengan banyaknya status.

Masing-masing status dalam perangkat mengakibatkan peranan-peranan tertentu, yang untuk masing-masing status dinamakan *role-set*. *Role-set* sebagai ulama mencakup peranan-peranan seperti: mengurus masjid, memimpin ibadah, berdakwah, menjadi panutan dan penasehat masyarakat. Sebagai suami ia berperan sebagai kepala rumah tangga, pencari nafkah, pendidik anak-anaknya, dan lain-lain. Tiap-tiap kategori orang dengan siapa ia berinteraksi dalam peranan-peranan itu mengharapkan sesuatu lain dari dia. Analisis sosial, yang bertitik tolak dari status dan peranan, antara lain akan menyoroti ketegangan intern di dalam tubuh suatu *role-set*, yang disebabkan oleh perbedaan posisi, sikap, nilai, harapan, dan pandangan yang mencirikan masing-masing relasi interaksi.

Sehubungan dengan peranan majelis taklim dalam tulisan ini adalah beberapa atau seperangkat fungsi majelis taklim dapat dijadikan mediator untuk berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat Islam, terutama di desa Payabenua. Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

Selain itu, peranan atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa bagian, yaitu: 1. Peranan nyata (Anacted Role) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan. 2. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu. 3. Konflik peranan (Role Conflick) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain. 4. Kesenjangan Peranan (Role Distance) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional. 5. Kegagalan Peran (Role Failure) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu. 6. Model peranan (Role Model) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.

Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya. Ketegangan peranan (Role Strain) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain. Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa : a. Peranan meliputi norma – norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

5. Konsep Pemberdayaan

Definisi Pemberdayaan Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal dari kata 'power' yang artinya kekuasaan atau keberdayaan. Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal: a. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun. b. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian yang tidak statis, melainkan dinamis.

Dalam kaitan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, banyak pakar yang membahas hal ini. Salah satunya adalah Payne, yang mengemukakan bahwa pemberdayaan (empowerment) pada intinya ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui dan fase percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

Secara harfiah, pemberdayaan bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan” kepada masyarakat yang lemah.

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Namun, hal yang penting dalam proses pemberdayaan yaitu peningkatan kesadaran. Masyarakat yang sadar adalah masyarakat yang memahami hal-hal dan tanggung jawab secara politik, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan sekelompok masyarakat untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat agar memiliki keberdayaan dalam menghadapi segala persoalan yang ada. Sebagaimana dikutip oleh Alfitri, menurut Craig dan Mayo konsep pemberdayaan masyarakat terdiri unsur kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan pemerataan.

Konsep ini memiliki cakupan luas tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut namun juga mencakup pengembangan secara keseluruhan, mulai dari aspek manusia, aspek sosial dan aspek ekonomi. Sebagaimana dikutip oleh Oos dalam bukunya, Slamet menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu di sini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil risiko, mampu mencari dan menangkap informasi serta mampu bertindak sesuai inisiatif.

Sedangkan indikator pemberdayaan menurut Suharto paling tidak memiliki empat hal, yaitu kegiatan yang terencana dan kolektif, memperbaiki kehidupan masyarakat, prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, serta dilakukan melalui program peningkatan kapasitas. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna dorongan atau motivasi, bimbingan, atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menuju perilaku baru yang baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.

Dari berbagai pandangan tersebut terlihat jelas bahwa konsep pemberdayaan masyarakat harus didasarkan pada keterlibatan semua pihak, baik pemerintah maupun semua lapisan masyarakat. Maka dari itu diambil rumusan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat merupakan rancangan pembangunan melalui proses pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya yang melibatkan seluruh pihak, baik masyarakat maupun pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat di berbagai bidang.

Dengan demikian, target dan tujuan itu sendiri dapat berbeda sesuai dengan bidang pembangunan yang digarap. Tujuan pemberdayaan bidang ekonomi belum tentu sama dengan tujuan pemberdayaan di bidang pendidikan ataupun bidang sosial. Misalnya, tujuan pemberdayaan bidang ekonomi adalah agar kelompok sasaran dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil. Pada bidang pendidikan,

memiliki tujuan agar kelompok sasaran dapat mengali berbagai potensi yang ada dalam dirinya dan memanfaatkan potensinya untuk mengatasi permasalahan yang dia hadapi. Sedangkan tujuan pemberdayaan pada bidang sosial misalnya agar kelompok sasaran dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali dengan peran dan tugas sosial.

Pemberdayaan erat kaitanya dengan pembangunan, dimana pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, untuk itu peran serta masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan karena merekalah objek sekaligus subjek pembangunan, sehingga berkembanglah model pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif merupakan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan otonomi daerah yang melekatkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Tujuan Pemberdayaan Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang tidak memiliki keberdayaan, baik karena kondisi internal, maupun karena kondisi eksternal (adanya ketidakadilan dalam struktur sosial). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka bisa memiliki kekuatan atau kemampuan dalam hal, antara lain: a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan. Tidak hanya bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari

kebodohan dan bebas dari kesakitan. b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang mungkin mereka dapat meningkatkan pendapatannya sehingga dapat memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

6. Konsep Organisasi

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Kartono 2006:7) Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hirarki dimana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau kelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau kelompok yang disebut bawahan.

Menurut Drs. Soekarno. K (dalam Hasibuan 2014 :120) organisasi sebagai fungsi manajemen (organisasi dalam pengertian dinamis) adalah organisasi yang memberikan kemungkinan bagi manajemen dapat bergerak dalam batas-batas tertentu. Organisasi dalam arti dinamis berarti organisasi itu mengadakan pembagian kerja.

Menurut Koontz & O'Donnel (dalam Hasibuan 2014 : 120) organisasi adalah hubungan wewenang dan dimaksud untuk mencapai koordinasi yang struktural, baik secara vertikal maupun horizontal diantara posisi-posisi yang telah disertai tugas-tugas khusus yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perubahan, jadi organisasi adalah hubungan struktural yang mengikat dan menyatukan perusahaan dan kerangka dasar tempat individu-individu berusaha, dikoordinasi.

Menurut Philip Senznick (dalam Hasibuan 2014: 121) organisasi adalah suatu sistem yang dinamis yang selalu berubah dan menyesuaikan dengan tekanan internal dan eksternal dan selalu dalam proses evolusi yang kontiniu.

Menurut Prof, Dr. Mr. S. Pradjudi Atmosudirjo (dalam Hasibuan 2014:121) organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama antara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut March and Simon (dalam Hasibuan 2014:121) organisasi adalah sistem yang kompleks yang terdiri dari unsur psikologis, sosiologis, teknologis, dan ekonomis yang dalam dirinya sendiri membutuhkan penyelidikan yang intensif.

Menurut James D.Mooney (dalam Syafiie 2003:113) organisasi adalah segala bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Menurut Jhon D. Millet (dalam Syafiie 2003:113) organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana perjalanan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan sesuatu tujuan bersama.

Menurut Drs. H. Melayu S.P.Hasibuan (dalam Hasibuan 2014:122) unsur-unsur organisasi yaitu :

1. Manusia (Human Factor), artinya organisasi baru ada jika ada unsur manusia yang bekerjasama, ada pemimpin dan ada yang dipimpin (bawahan)
2. Tempat kedudukan, artinya organisasi baru ada, jika ada tempat kedudukannya
3. Tujuan artinya, organisasi baru ada jika ada tujuan yang ingin dicapai
4. Pekerjaan, artinya organisasi itu baru ada jika ada pekerjaan yang akan dikerjakan serta adanya pembagian pekerjaan
5. Struktur, artinya organisasi itu baru ada jika ada hubungan dan kerja sama antara manusia yang satu dengan yang lainnya
6. Teknologi, artinya organisasi baru ada jika terdapat unsur teknis
7. Lingkungan(*environment external social system*).

7. Konsep Pemimpin

Pemimpin/leader macam-macam pengertian dari para ahli. Berikut ini beberapa defenisi tentang defenisi yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya;

Menurut Hasibuan (2011:157), pemimpin adalah seorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai tujuan.

Menurut Kartono (2010:18), pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.

Menurut Henry Pratt Pairchild (dalam Kartono 2010:23), pemimpin adalah seorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha/upaya orang lain atau melalui kekuasaan dan posisi.

Sebagaimana diungkapkan Sedermayanti (2009:119) bahwa pemimpin (leader) adalah :

- a. Seseorang yang mampu memengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan
- b. Seseorang yang menjalankan kepemimpinan sedangkan pimpinan (manager) adalah seseorang yang menjalankan manajemen. Orang yang sama harus menjalankan dua hal secara efektif. Manajemen dan kepemimpinan
- c. Orang yang melakukan atau menjalankan kepemimpinan
- d. Kata “pemimpin” mencerminkan kedudukan seseorang atau kelompok orang pada hirarki tertentu dalam organisasi, yang mempunyai bawahan, karena kedudukan yang bersangkutan mendapatkan atau mempunyai kekuasaan formal, dan tanggung jawab.

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi.

8. Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan yang bermakna menjadi penting sebab ia membuat suatu perbedaan ini muncul dalam kehidupan para pengikut di dalam suatu kelompok organisasi. Terdapat juga perbedaan dalam kinerja kelompok atau organisasi, dan ada pula suatu perbedaannya yang penting dalam organisasi itu sendiri sebagai hasil dari kepemimpinan yang penting dan bermakna.

Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk membangkitkan semangat orang lain agar bersedia dan memiliki tanggung jawab total terhadap usaha mencapai atau melampaui tujuan organisasi, tanpa kepemimpinan dan bimbingan maka antara tujuan dan perseorangan tujuan organisasi bisa menjadi renggang.

Menurut Joseph C. Rost, dalam buku Triantoro Safria (2014: 3) Kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut (bawahan) yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersama.

Menurut Kartono Kartini, dalam buku Pemimpin dan Kepemimpinan (2010:18) pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang sehingga mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.

Menurut Sedermayanti (2009:130), mengatakan Fungsi merupakan gejala sosial, karna harus mewujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi sosial kelompok/ organisasi. Fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi :

- a. Dimensi berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan dalam tindakan/ aktivitas pemimpin.
- b. Dimensi berkenaan dengan tingkat dukungan / keterlibatan orang yang di pimpin dalam melaksanakan tugas pokok kelompok/ organisasi.

Menurut Stogdill dalam buku Kartini Kartono (2010:157) mengatakan kepemimpinan atau leadership adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok yang terorganisasi dalam usaha-usaha menentukan tujuan dan mencapainya.

Adapun fungsi kepemimpinan menurut Koonzt dalam Kartono (2002:93) adalah mengajak atau menghibau semua bawahan atau pengikut, agar dengan penuh kemauan untuk memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan kemampuan secara maksimal.

Menurut Sondang P Siagian, M.P.A (2010-129) menemukan berapa gaya kepemimpinan antara lain:

- a. Kompleksitas tugas yang harus diselenggarakan
- b. Jenis pekerjaan, misalnya apakah bersifat rutin atau inovatif
- c. Bentuk dan sifat teknologi yang digunakan
- d. Persepsi, sikap dan gaya yang digunakan oleh para pejabat pimpinan yang menduduki hirarki jabatan yang lebih tinggi
- e. Norma-norma yang dianut oleh kelompok kerja yang berada dibawah pimpinan yang bersangkutan
- f. Tentang kendali yang paling tepat untuk diterapkan

- g. Ancaman yang datang dari luar organisasi yang mesti dihadapi, misalnya dalam bentuk persaingan bagi suatu organisasi niaga
- h. Tingkat stress yang mungkin timbul sebagai akibat beban tugas, tingkat tanggung jawab, desakan waktu dan faktor-faktor lainnya yang dapat menimbulkan ketengangan
- i. Iklim yang terdapat dalam organisasi

Menurut Dyah dan Arif (2014:129) Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang (pemimpin) untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang yang dipengaruhi bertindak laku seperti yang dikehendaki pemimpin.

Pemimpin (leader) adalah seorang individu yang terdapat dalam sebuah kelompok atau organisasi yang mempunyai pengaruh paling kuat terhadap individu yang lain menurut Greenberg dalam Nuraini (2004:69)

Fungsi kepemimpinan menurut Nawawi (2006:9) adalah kemampuan atau kecerdasan mendorong sejumlah orang (dua orang atau lebih) agar bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan yang terarah pada tujuan bersama yaitu :

1. Pemimpin sebagai penentu arah yaitu arah yang hendak ditempuh oleh organisasi menuju tujuannya harus sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan pemanfaatan dari segala sarana dan prasarana yang tersedia. Dalam fungsi penentu arah yaitu :
 - a. Perumusan strategi
 - b. Pengambilan keputusan

- c. Memberikan motivasi
2. Pemimpin sebagai wakil dan juru bicara yaitu pimpinan perlu mengetahui keputusan lain yang telah di buat oleh bawahan, Dalam fungsi sebagai wakil dan juru bicara yaitu:
 - a. Membentuk suasana organisasi yang baik
 - b. Pemeliharaan hubungan didalam organisasi
 - c. Pemeliharaan hubungan diluar organisasi
 3. Pimpinan selaku komunikator yaitu menyampaikan suatu keputusan dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta menyampaikan informasi kepada pihak lain, Dalam fungsi pimpinan selaku komunikator yaitu :
 - a. Mampu menjelaskan
 - b. Mampu mempengaruhi
 - c. Mampu menyatukan
 4. Pemimpin selaku mediator yaitu focus sebagai penyelesaian situasi konflik yang mungkin tumbuh dalam organisasi, Dalam fungsi selaku mediator yaitu ;
 - a. Pencegahan adanya konflik
 - b. Penyelesaian konflik
 - c. Pengadaan mediasi
 5. Pemimpin selaku integrator yaitu adanya pembagaian tugas dan diperlukan spesialis, oleh karena itu diperlukan integritas terutama pada pihak hirarki, hanya pimpinanlah yang berada diatas, Dalam fungsi selaku integrator yaitu :
 - a. Mampu menyatukan persepsi
 - b. Mampu menghilangkan perbedaan

- c. Adanya satu tindakan

Menurut Adair dalam Pasalong (2010:22-23) Fungsi Kepemimpinan yaitu:

1. Perencanaan
2. Pemrakkarsaan
3. Pengendalian
4. Pendukung
5. Penginformasi
6. Pengevaluasian

Menurut Lako (2004:80) Kepemimpinan (*leadership*) memiliki makna yang luas, yaitu:

1. Sebagai suatu proses untuk mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas para anggota kelompok.
2. Memberikan visi, rasa gembira, kegairahan, cinta kepercayaan, semangat, obsesi, dan konsisten kepada para anggota organisasi.
3. Menggunakan symbol-simbol, memberikan perhatian, menunjukkan contoh atau tindakan nyata, menghasilkan para pahlawan pada semua level organisasi, dan memberikan pelatihan secara efektif kepada anggota organisasi dan masih banyak.

Menurut Sedarmayanti juga mengatakan lima pokok kepemimpinan yaitu:

- a. Fungsi intruksi
- b. Fungsi Konsultasi
- c. Fungsi Partisipasi
- d. Fungsi Delegasi

e. Fungsi Pengendalian

Menurut Sedermayanti (2009:153) pendekatan tingkat laku pada kepemimpinan artinya perbuatan, kelakuan, atau perangai, dalam pendekatan tingkah laku, dimensi kepemimpinan efektif, terdiri dari dua aspek utama:

1. Aspek Fungsi Kepemimpinan

- a. Fungsi yang berhubungan dengan tugas atau pemecahan masalah.
- b. Fungsi pemeliharaan kelompok/sosial.

Pemberian sasaran penyelesaian, informasi dan pendapat.

Fungsi pemeliharaan kelompok/sosial, segala sesuatu yang dapat membantu kelompok berjalan lebih lancar menegahi perselisihan perbedaan pendapat, persetujuan dengan kelompok lain dan memastikan individu merasa di hargai kelompok.

Fungsi yang harus di selenggarakan pimpinan:

- a. Memberitahui kebijakan pimpinan organisasi kepada staf pembantu dan merumuskan menjadi pekerjaan staf termasuk implikasi.
- b. Memimpin mengkoordinasi pelaksanaan pekerjaan staf serta membantu anggota staf yang kesukaran dalam masalah yang dihadapi salam pemecahan dan penyelesaian masalah.
- c. Mengadakan pegecekan terhadap kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan staf.
- d. Mengadakan integrasi pekerjaan staf.

- e. Memberi keterangan/penjelasan kepada pimpinan tentang perkembangan tugas staf.
- f. Menerima petunjuk dan keputusan dari pimpinan untuk diolah sebagai tugas staf.
- g. Mengambil langkah yang di perlukan agar keputusan pimpinan dapat terlaksanakan dengan efektif.
- h. Mengumpulkan lapporan tentang pelaksanaan dari ini.
- i. Menggerakan staf untuk mempelajari keadaan dan kemungkinan untuk perencanaan inovatif.

2. Aspek gaya kepemimpinan

Pemimpin akan berhasil memimpin secara efektif bila:

- a. Mempunyai kecerdasan tinggi untuk memikirkan dan mencari pemecahan persoalan
- b. Mempunyai emosi stabil
- c. Mempunyai kepandaian dalam menghadapi manusia dan mampu mamhuat bawahan betah, senang, dan puas dengan dalam pekaerjaan
- d. Mempunyai keahlian mengorganisasi dan menggerakan bawahan secara kebijaksana.
- e. Mempunyai ketrampilan manajemen untuk menghadapi persoalan masyarakat.

9. Konsep manajemen

Lahirnya konsep Manajemen ditengah gejolak masyarakat sebagai konsekuensi akibat tidak seimbangnya pengembangan teknis dengan kemampuan sosial. Istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, administrasi dan sebagainya. Sebagai perbandingan studi lebih lanjut berikut pengertian manajemen menurut para ahli.

Menurut Jhon D.Millet (dalam Siswanto 2013:1) membatasi manajemen sebagai suatu proses pengarah dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.

Menurut Millet lebih menekankan bahwa manajemen sebagai suatu proses, yaitu suatu rangkaian aktivitas yang satu sama lain berurutan.

- a. Proses pengarah, yaitu rangkaian kegiatan untuk memberikan petunjuk atau intruksi dari seseorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok/formal dan untuk pencapaian tujuan
- b. Proses pemberian fasilitas, yaitu rangkaian kegiatan untuk memberikan sarana dan prasarana serta jasa yang memudahkan pelaksanaan pekerjaan dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang terorganisasi dalam kelompok formal dalam pencapaian tujuan.

Menurut James A.F Stroner dan Charles Wankel (dalam Siswanto 2013:2) memberikan batasan manajemen, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan

penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi.

Menurut Paul Hersay dan Kenneth H. Blancard(dalam Siswanto 2013 :2) memberi batasan manajemen sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.

Manajemen merupakan ilmu pengetahuan juga dalam artian bahwa manajemen memerlukan disiplin ilmu-ilmu pengetahuan lain dalam penerapannya yaitu ilmu ekonomi, statistik, akuntansi dan sebagainya.

Menurut Drs. Melayu S.P Hasibuan (dalam Hasibuan 2014:2) manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Terry (dalam Hasibuan 2005:3-4) manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Menurut Stonner (dalam Siswanto 2015:2) mendefinisikan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan oenggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Focus studi manajemen adalah menciptakan efektivitas dan efisiensi, sedangkan Locusnya adalah berbagai bentuk dari jenis organisasinya. Kedua prapta ini sama-sama memandang manusia sebagai sumberdaya strategis setiap organisasi. Oleh karena itu, penelaahan terhadap setiap fungsi manajemen umumnya tertuju kepada peranan sumberdaya manusia sebagai pengguna dan pengelola daya lainnya yang dimiliki oleh organisasi.

Menurut Andrew F. Sikula (dalam Hasibuan 2014:2) manajemen pada umum dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasia, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Akumulasi tugas yang dijadikan fungsi suatu jabatan, tentu tidak sama antara satu dengan jabatan lainnya. Hal ini selalu dikaitkan dengan spesifikasi uraian tugas masing-masing departemen atau unit-unit organisasi. Secara teritis, untuk melaksanakan uraian tugas itu secara efektif dan efisien, kepada seorang manajer tertentu disyaratkan agar memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang spesifik pula. Disamping itu kepada seorang administrator juga disyaratkan dan mengarahkan seluruh sumberdaya yang dimiliki atau dibawah kuasa pengelola organisasi.

Pengetahuan dan keterampilan tersebut adalah manajemen baik secara seni maupun pengetahuan. Argumentasi teoriti tentang esensialnya memiliki

pengetahuan dan keterampilan manajemen bagi kalangan administrator pemimpin, manajer atau sebutan lainnya yang sering dalam melaksanakan fungsi dan tugas-tugasnya.

10. Konsep Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan element utama organisasi dibandingkan dengan elemen lainnya seperti modal, teknologi, dan uang sebab manusia itu sendiri yang mengendalikan yang lainnya. Manusia yang memilih teknologi, manusia yang mencari modal, manusia yang menggunakan dan memeliharanya, disamping manusia dapat menjadi salah satu sumber keunggulan yang lainnya oleh karena itu pengelolaan sumber daya dalam organisasi menjadi suatu hal sangat penting. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan aktivitas untuk mendapatkan sumber daya manusia, mengelola, mengembangkan, memelihara, dan mendayagunakan untuk mendukung organisasi mencapai tujuannya.

Manajemen hanyalah merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Suatu manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan dari pada penguasaan, karyawan dan juga masyarakat, menurut Hasibuan (1995;7) yang mengatakan bahwa dengan adanya manajemen daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan. Unsur-unsur manajemen antara lain :

a. Man

Man dalam organisasi publik diartikan sebagai sesuatu yang sangat menentukan karena manusia yang membuat tujuan melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tanpa manusia tidak ada proses kerja

- b. *Money*
Uang penting sebagai alat ukur dan alat ukur mengenai suatu usaha (besar kecilnya perusahaan diukur dari jumlah perputaran uang).
- c. *Materials (bahan-bahan/perlengkapan)*
Manajemen ada karna adanya kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus material.
- d. *Machines (alat-alat)*
Mesin sebagai alat bantu kerja, memudahkan melaksanakan pekerjaan, memberi keuntungan terhadap tenaga kerja, penggunaannya sangat tergantung kepada manusia serta mempermudah tujuan hidup manusia.
- e. *Method (cara0cara kerja)*
Tercapai atau tidaknya tujuan tergantung pada cara pelaksanaannya dengan cara kerja yang baik dan mempelancar dan mempermudah jalannya pekerjaan.
- f. *Market*
Market dalam organisasi publik diartikan sebagai masyarakat atau warga negara anggota organisasi.

Dalam perkembangan unsur man (manusia) telah berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut sebagai sumber daya manusia. manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari khusus pada satu unsur manajemen tersebut yaitu man (manusia). tanpa sumber daya manusia, maka sumber daya lainnya kurang bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi, maka untuk ini sangat diperlukan manajemen sumber daya manusia sebagai pengatur bagaimana untuk menjalankan sebuah organisasi yang dibentuk dengan memanfaatkan sumber daya organisasi yang ada.

Menurut Hasibuan (1995;11) yang mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah sebuah ilmu dan juga seni yang mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan juga masyarakat.

Sedangkan Nawawi (2008;41) yang menyebutkan bahwa ada tiga pengertian sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

1. sumber daya manusia (SDM) adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan),
2. sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
3. sumber daya manusia (SDM) adalah potensi yang merupakan aset dan fungsi sebagai modal (non material dan non finansial) didalam organisasi yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi sebuah organisasi.

2. Penelitian Terdahulu

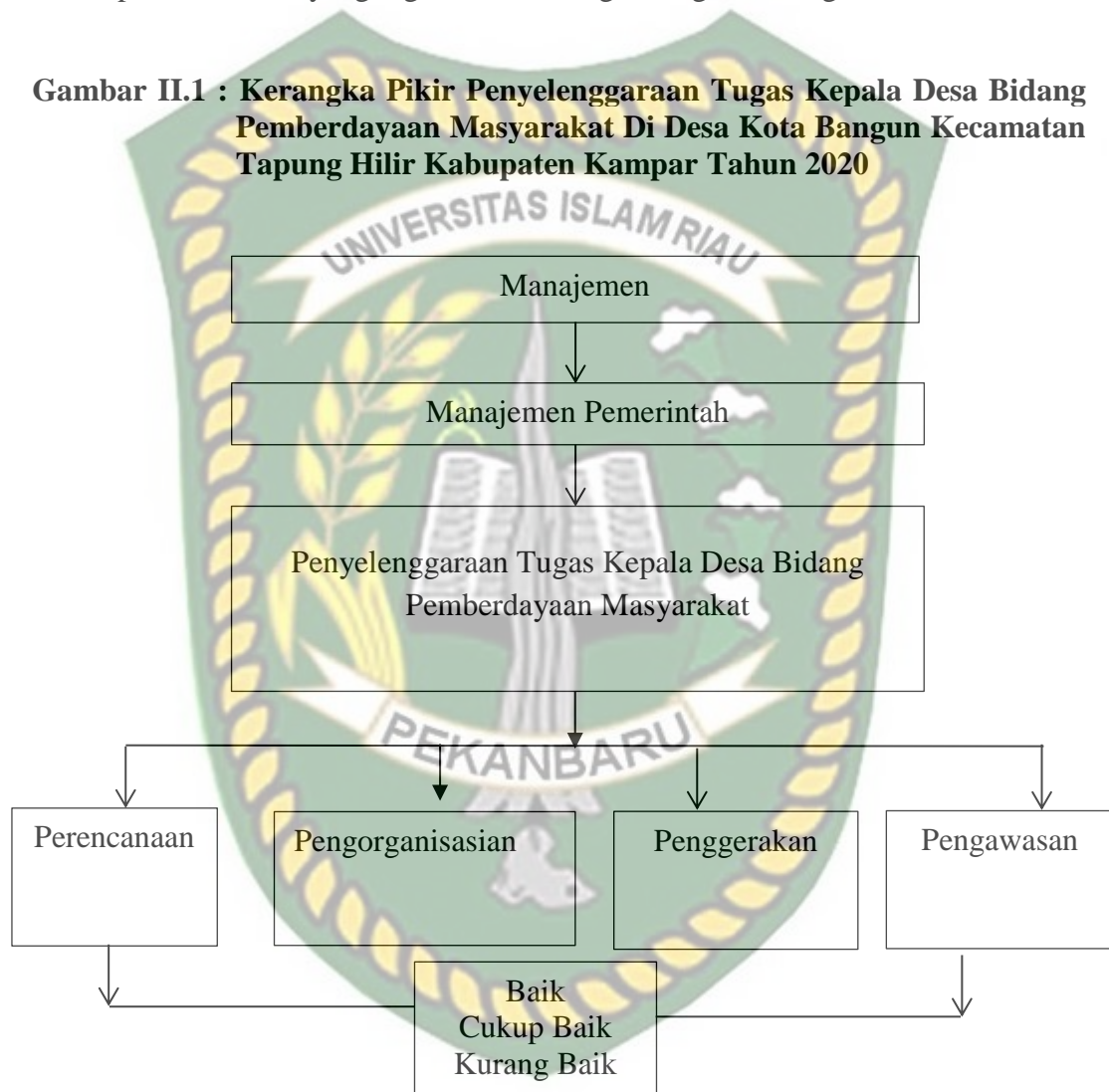
Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan berkaitan dengan tema/gejala yang diteliti dihimpun untuk dijadikan data dan referensi pendukung guna mempertegas teori-teori yang telah ada mengenai penyelenggaraan Tugas Kepala Desa. Beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut :

No	Nama	Judul	Teori	Indikator
1.	Azmi Nurhakiki	Kinerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat (Studi Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran)	Teori implementasi yang digunakan adalah Tangkilisan (2005: 26)	a) Efisiensi b) Efektivitas c) Keadilan d) Daya tanggap
2.	Anggi Utami	Analisis Fungsi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	Teori implementasi yang digunakan adalah Talcott Parson	a) Afektifitas b) Orientasi Kolektif c) Partikularisme d) Askripsi e) diffuseness

3. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikiran sebagai konsep untuk menganalisis variabel dalam penelitian ini , yang digambarkan dengan diagram sebagai berikut :

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Tahun 2020



Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah penganalisaan dalam penelitian ini, maka peneliti menguraikan konsep operasional sebagai berikut :

- a. Pemerintahan adalah sebuah system multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa public dan layanan civil.
- b. Peranan diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.
- c. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisiensi untuk mencapai suatu tujuan tertentu
- d. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi
- e. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk membangkitkan semangat orang lain agar bersedia dan memiliki tanggung jawab total terhadap usaha mencapai atau melampaui tujuan organisasi, tanpa kepemimpinan atau bimbingan maka antara tujuan perseorangan dan tujuan organisasi menjadi renggang (lemah).
- f. Manajemen sumber daya manusia proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi semaksimal mungkin bagi pencapaian tujuan sebuah organisasi.

- g. Perencanaan adalah tindak memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal aktifitas-aktifitas yang diusulkan.
- h. Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien
- i. Penggerakan yaitu membuat semua anggota Organisasi mau bekerja sama dan bekerja keras secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai perencanaan dan usaha pengorganisasian.
- j. Desa adalah suatu perwujudan geografis social ekonomi, politis, dan cultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.



E. Operasional Variabel

Tabel II.1 : Operasional Variabel Tentang Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

Konsep	Variabel	Indikator	Item penelitian	Skala pengukuran
1	2	3	4	5
<p>Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi.</p> <p>T. James A.F Stroner dan Charles Wankel (dalam Siswanto 2013:2)</p>	<p>Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun</p>	1. Perencanaan	<p>a. Perumusan strategi</p> <p>b. Pengambilan keputusan</p> <p>c. Memberi motivasi</p>	<p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p>
		2. Pengorganisasian	<p>a. Membentuk suasana organisasi yang baik</p> <p>b. Pemeliharaan hubungan didalam organisasi</p> <p>c. Pemeliharaan hubungan diluar organisasi</p>	<p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p>
		3. Penggerakan	<p>a. Mampu menjelaskan</p> <p>b. Mampu mempengaruhi</p> <p>c. Mampu menyatukan</p>	<p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p>
		4. Pengawasan	<p>a. Mampu menyatukan presepsi</p> <p>b. Mampu menghilangkan perbedaan</p> <p>c. Adanya satu tindakan</p>	<p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p>

Sumber : Modifikasi Penulis, Tahun 2021

E. Teknik Pengukuran

Pengukuran terhadap setiap indikator variabel, penelitian ini menggunakan Skala Likert. Skala Likert (Sugiyono, 2010: 107) digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Sementara ukuran dari masing-masing indikator variable adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan dikategorikan

Baik : Apabila semua indikator variabel berada pada kategori baik atau pada ukuran $\geq 67\%$.

Cukup Baik : Apabila hanya 2-3 dari indikator variabel berada pada kategori Cukup baik dengan pengukuran 34 – 66%.

Kurang Baik : Apabila 0-1 dari indikator variabel berada pada kategori Kurang Baik atau dengan pengukuran $\leq 33\%$.

b. Pengorganisasian dikategorikan

Baik : Apabila semua indikator variabel berada pada kategori baik atau pada ukuran $\geq 67\%$.

Cukup Baik : Apabila hanya 2-3 dari indikator variabel berada pada kategori cukup baik dengan pengukuran 34 – 66%.

Kurang Baik : Apabila 0-1 dari indikator variabel berada pada kategori Kurang baik atau dengan pengukuran $\leq 33\%$.

c. Penggerakan dikategorikan

Baik : Apabila semua indikator variabel berada pada kategori baik atau pada ukuran $\geq 67\%$.

Cukup Baik : Apabila hanya 2-3 dari indikator variabel berada pada kategori Cukup baik dengan pengukuran 34 – 66%.

Kurang Baik : Apabila 0-1 dari indikator variabel berada pada kategori Kurang baik atau dengan pengukuran $\leq 33\%$.

d. Pengawasan dikategorikan

Baik : Apabila semua indikator variabel berada pada kategori baik atau pada ukuran $\geq 67\%$.

Cukup Baik : Apabila hanya 2-3 dari indikator variabel berada pada kategori Cukup baik dengan pengukuran 34 – 66%.

Kurang Baik : Apabila 0-1 dari indikator variabel berada pada kategori Kurang baik atau dengan pengukuran $\leq 33\%$.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian Survey Deskriptif yang dilakukan dalam penelitian untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala dan permasalahan yang ada serta mencari keterangan selengkap-lengkapannya. Kemudian penelitian ini mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuisioner, observasi, dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data yang pokok, jadi dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012:35) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel satu dengan yang lain.

B. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini Penulis akan meneliti di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, peneliti memilih lokasi ini karena dilokasi tersebut ada permasalahan penelitian yang akan diteliti yaitu : karena peneliti menemukan permasalahan-permasalahan dan kejanggalan seperti kurangnya fungsi kepemimpinan Kepala Desa di Desa Kota Bangun kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, kurang efektifnya program PKK sehingga kegiatan tersebut tidak berjalan, serta data-data yang didapat juga lebih mudah

karena masih dalam ruang wilayah peneliti, sehingga lebih efektif dan efisien dalam mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

C. Populasi Dan Sampel

Menurut Sugiyono (2010: 90) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Ada pun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, Staf Desa, Kaur desa, pengurusan BPD, pengurusan LPMD, Ketua Rw, Ketua Rt, serta kepala keluarga yang ada di 3 dusun, serta masyarakat.

Menurut Soehartono (2008:57) sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya. untuk lebih jelas keadaan populasi dan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.1 Keadaan Populasi dan Sampel Penelitian Pada Kantor Kepala Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

No	Populasi	Populasi (KK)	Sampel	Presentase
1.	Kepala Desa	1	1	100%
2.	Sekretaris Desa	1	1	100%
3.	Kaur Umum	1	1	100%
4.	Staff Desa	1	1	100%
5.	Ketua BPD	6	1	100%
6.	Ketua LKMD/LPM	1	1	100%
7.	Masyarakat atau KK			
	a. Dusun 1	22	1	4.54%
	b. Dusun 2	22	1	4.54%
	c. Dusun 3	22	1	4.54%
8.	RT 1	10	3	30 %
9.	RT 2	10	3	30%
10.	RT 3	10	3	30%
	Jumlah	72	9	12.5%

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Kota Bangun Tahun 2021

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Kepala Desa,
2. Untuk staff desa dari 6 orang diambil 1 orang dan masyarakat yang terdiri dari lembaga RT\RW diambil 9 orang dan teknik sample adalah purposive

E. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2013;137) menjelaskan data primer dan data sekunder bahwa:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung meliputi dokumen-dokumen perusahaan berupa sejarah perkembangan perusahaan, struktur organisasi dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.
- b. Questioner (Angket)

Menurut Sugiyono (2012:162) questioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.

- c. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan atau responden untuk memperoleh keterangan yang diperlukan.
- d. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

G. Teknik Analisa Data

Data yang terkumpul akan dianalisa secara deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis dari sejumlah data kuantitatif. Kemudian penelitian ini juga menggunakan teknik analisis kualitatif untuk menjelaskan data yang telah didapat, lalu dijelaskan melalui teknik kuantitatif



H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.1. Jadwal waktu kegiatan Penelitian Tentang Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2021																			
		September				November				November				Desember				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP																				
2	Seminar UP																				
3	Riset																				
4	Penelitian Lapangan																				
5	Pengelolaan dan Analisa Data																				
6	Konsultasi dan Bimbingan Skripsi																				
7	Ujian Skripsi																				
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																				
9	Penyerahan Skripsi																				

Sumber : Modifikasi Penulis, Tahun 2021

BAB IV

GAMBAR UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar terbentuk sejak tahun 1956 berdasarkan UU No 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS. 318VII1987 tanggal 17 Juli 1987. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangarayan dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci. Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung di bawah koordinator Kabupaten. Maka luas kabupaten Kampar menjadi 11.289,28 km dengan jumlah kecamatan sebanyak 21 kecamatan.

Ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan UU No. 12 tahun 1956. Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibukota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain:

- a. Pekanbaru sudah menjadi ibukota Provinsi Riau.
- b. Pekanbaru selain menjadi ibukota Provinsi juga sudah menjadi Kota Madya.

- c. Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibukota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Revitalisasi dan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Kerangka

Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yaitu kabupaten pelalawan, kabupaten rokan hulu dan kabupaten Kampar. Dengan dimekarkannya kabupaten Kampar menjadi 3 kabupaten Kampar, maka kabupaten Kampar yang awalnya terdiri 19 kecamatan tinggal lagi 8 kecamatan. Seiring berjalannya waktu, pemekaran kecamatan dan desa\kelurahan dikabupaten Kampar terus dilakukan. Hingga tahun 2016, kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan, 242 desa dan 8 kelurahan. 21 kecamatan tersebut yaitu :

1. Kecamatan Bangkinang
2. Kecamatan Bangkinang Kota
3. Kecamatan Gunung Sahilan
4. Kecamatan XIII Koto kampar
5. Kecamatan kampa
6. Kecamatan Kampar
7. Kecamatan kampar Kiri
8. Kecamatan Kampar Kiri Hilir
9. Kampar Kiri Hilu
10. Kampar Kiri Tengah
11. Kecamatan Utara

12. Kecamatan Koto Kampar Hulu
13. Kecamatan Kuok
14. Kecamatan Perhentian Raja
15. Rumbio Jaya
16. Kecamatan Salo
17. Kecamatan Siak Hulu
18. Kecamatan Tambang
19. Kecamatan Tapung
20. Kecamatan Tapung Hilir
21. Kecamatan Tapung Hulu

B. DESKRIPSI GEOGRAFI WILAYAH KABUPATEN KAMPAR

Kabupaten Kampar Secara Geografis terletak antara $01^{\circ}00'40''$ lintang utara sampai $00^{\circ}27'00''$ lintang selatan dan $100^{\circ}28'30''$ - $101^{\circ}14'30''$ bujur timur. Luas wilayah kabupaten Kampar yaitu 11.289,28 km² dengan ibukota Kabupaten yaitu Bangkinang. Batas-batas wilayah kabupaten Kampar diantaranya :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Propinsi Sumatera Barat.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Di daerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu:

1. Sungai Kampar yang panjangnya \pm 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dengan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu dan Kampar Kiri.
2. Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya \pm 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung.

C. SEJARAH SINGKAT DESA KOTA BANGUN TAPUNG HILIR

Desa kota bangun adalah nama suatu wilayah dikecamatan tapung hilir, yang menurut beberapa toko masyarakat pada awalnya adalah suatu sudut desa yang lahir karna adanya program pemerintah yaitu transmigrasi pada tahun 1982 yang nama aslinya unit penempatan transmigrasi sentral penduduk 2 (sp 2) yang penduduknya berasal dari tanah jawa yang pada saat itu berjumlah 852 KK dan dipimpin oleh seorang kepala unit penempatan transmigrasi (K.U.P.T) dari departemen transmigrasi yang bernama MULYA MANASIH pada tahun 1982 dan pengelolaan desa diserahkan kepada pemerintah provinsi riau. Wilayah Kecamatan Tapung Hilir Terdiri dari 16 desa yaitu :

1. Tapung Makmur
2. Tapung Lestari
3. Tanah Tinggi
4. Tandan Sari

5. Gerbang Sari
6. Kota Garo
7. Kijang Jaya
8. Tebing Lestari
9. Suka Maju
10. Kijang Makmur
11. Beringin Lestari
12. Cinta Damai
13. Koto Bangun
14. Koto Aman
15. Sikijang
16. Kota baru

D. Deskripsi Geografis Wilayah Desa Kota Bangun

a. Letak dan Luas Wilayah

Secara geografis desa kota bangun merupakan daerah dataran rendah yang didominasi dan dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit. luas wilayah desa kota bangun 2343,49 ha.

b. Batas wilayah

Batas-batas wilayah desa kota bangun adalah :

- i. sebelah utara berbatasan dengan Desa Cinta Damai kecamatan Tapung Hilir
- ii. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kota Garo kecamatan Tapung Hilir
- iii. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kota Aman kecamatan Tapung Hilir
- iv. Sebelah timur berbatasan dengan desa Kota Garo kecamatan Tapung Hilir.



E. Pendidikan

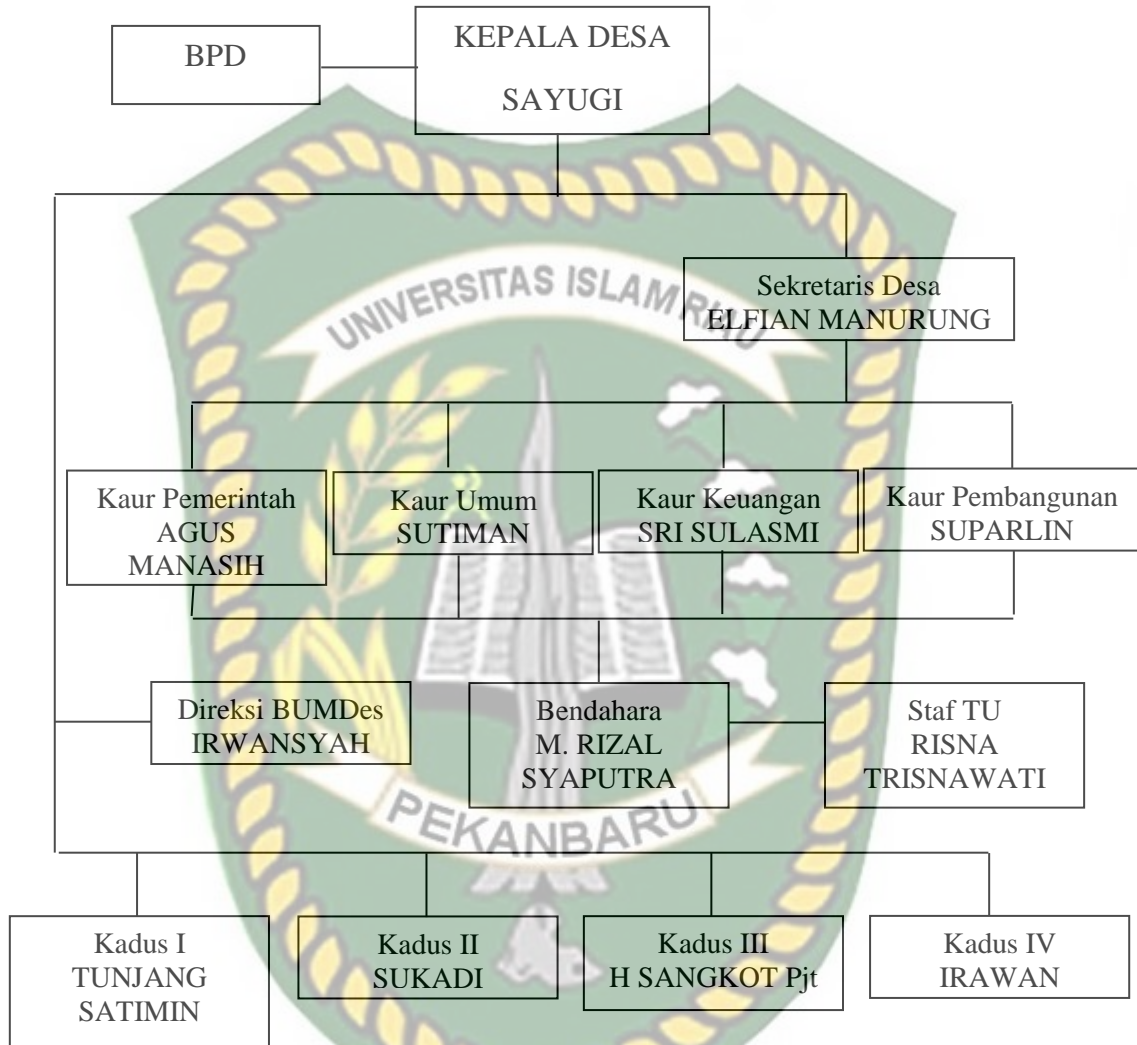
Pendidikan adalah salah satu hal yang terpenting yang harus di tanam dan di perbaharui di dalam kehidupan masyarakat, karena rendah dan tingginya tingkat pendidikan di suatu daerah atau desa sangat berpengaruh terhadap daerah itu sendiri. Penduduk desa Kota Bangun ini rata-rata pendidikannya SLTA/SMA, pendidikan di desa ini sudah cukup baik dan saat ini penduduk desa Kota Bangun ini sudah banyak yang kuliah di perguruan tinggi, sehingga cara berfikir dan tingkah laku masyarakatnya pun sudah cukup baik sehingga desa Kota Bangun ini termasuk desa maju.

F. AGAMA

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah lepas dari hubungan sesama manusia dan hubungan kepada Sang Pencipta, oleh karena itu harus ada keserasian antara keduanya dalam menjalani kehidupan. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai kedudukan dan martabat yang sama dimata sang Khalik dan semua manusia mempunyai hak dalam menentukan hidupnya seendiri, diantaranya adalah hak azazi untuk memeluk agama yang diyakini.

Indonesia merupakan Negara yang memberikan kebebasan kepada warga nya untuk memeluk agama sesuai kepercayaan mereka. Di Indonesia terdapat enam Agama yang diakui yaitu Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghutchu. Berdasarkan Observasi dilokasi penelitian bahwa mayoritas beragama Islam dan terdapat juga agama Kristen.

G. STRUKTUR ORGANISASI DESA KOTA BANGUN



Sumber: Kantor Kepala Desa Kota Bangun Kabupaten Kampar

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Identitas responden merupakan keterangan yang diperoleh dari responden, yang diperlukan untuk memberikan gambaran yang signifikan (jelas) antara data dengan responden analisis yang dilakukan, identitas responden juga dibutuhkan untuk menjawab tujuan dari penelitian. Identitas responden mengenai Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

yang penulis paparkan dalam penelitian ini adalah berdasarkan nama, jenis kelamin, umur, dan tingkat pendidikan. Sedangkan untuk masyarakat yang ikut dalam kegiatan kepedulian terhadap korupsi yang penulis paparkan dalam penelitian ini adalah berdasarkan nama, jenis kelamin, umur, dan tingkat pendidikan. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada keterangan dibawah ini sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada identitas responden mengenai Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan masyarakat yang ikut dalam kegiatan kepedulian terhadap korupsi terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan kelamin perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan dalam bekerja. untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin

responden Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

masyarakat yang ikut dalam kegiatan kepedulian terhadap korupsi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.1 Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin mengenai Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Peresentase
1	Laki-laki	40	59%
2	Perempuan	28	41%
Jumlah		68	100%

Sumber: Data hasil olahan lapangan, 2019

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah responden mengenai Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dilihat dari jenis kelamin yaitu untuk laki-laki sebanyak 40 orang dengan peresentase 59%, dan untuk jenis kelamin perempuan sebanyak 28 orang dengan peresentase 41%. Dari keseluruhan pegawai yang berjumlah 68 orang.

2. Umur

Umur merupakan suatu tingkat kematangan pikiran seseorang dalam rangka mengambil keputusan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Seperti diketahui bahwa pegawai yang lebih tua umurnya akan lebih bijaksana dalam mengambil tindakan dari pada pegawai yang lebih muda, akan tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa lebih tua umur seseorang maka

kemampuan fisiknya akan lebih cepat mengalami kelelahan dalam melakukan pekerjaan jika dibandingkan dengan pegawai yang umurnya lebih muda. Untuk lebih jelasnya mengenai umur Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel V.2 Distribusi Responden mengenai Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

No	Umur	Jumlah	Presentase
1	20-30	12	18%
2	31-40	26	38%
3	41-50	30	44%
4	>50	-	-
Jumlah		68	100%

Sumber: Data hasil olahan lapangan, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk identitas responden pegawai jika dilihat dari tingkat umur maka menjadi beragam. Untuk umur 20-30 tahun berjumlah 12 orang dengan peresentase 18%, umur 31-40 tahun berjumlah 26 orang dengan peresentase 38%, dan umur 41-50 tahun berjumlah 30 orang dengan peresentasi 44% dan umur >50 tahun tidak ada.

3. Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin matang pola pikir seseorang dalam berbuat dan bertingkah laku dalam mengambil keputusan dalam rangka melaksanakan suatu pekerjaan. Pendidikan merupakan suatu usaha seseorang dalam rangka memberikan pengembangan terhadap pola pikir orang lain dalam

memahami dan menilai sesuatu dimana dari tingkat pendidikan kita mengetahui kemampuan seseorang yang cenderung akan mempengaruhi pola pikir serta tingkah laku setiap orang. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan responden Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.3 Distribusi Responden Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan mengenai Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SLTA	60	-
2	Diploma	5	29%
3	Strata 1	3	59%
4	Strata 2	-	12%
Jumlah		68	100%

Sumber: Data hasil olahan lapangan, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk identitas responden pegawai dilihat dari tingkat pendidikan terdiri dari berbagai tingkatan. Untuk pendidikan Diploma berjumlah 5 orang dengan presentase 29% untuk Strata 1 berjumlah 10 orang dengan presentase 59%, dan untuk pendidikan Strata 2 berjumlah 2 orang dengan presentase 12%. Dengan adanya peningkatan pendidikan maka sumber daya di Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar akan lebih mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efektif dan penuh rasa tanggung jawab.

B. Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

Dari data yang di peroleh penulis dari hasil wawancara dan kuesioner dengan responden masyarakat dan juga Pegawai di Kantor Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, maka penulis akan menyajikan dan menganalisis data-data tersebut dalam bentuk uraian serta gambaran mengenai Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Untuk mengetahui Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, maka penulis menguraikan sebagai berikut:

A. Perencanaan

Harrold Koontz dan O'Donnell (dikutip Sukarna) dalam bukunya "Principle of Management" mengemukakan "Perencanaan adalah fungsi dari pada manajer dalam pemilihan-pemilihan alternatif, tujuan-tujuan, kebijaksanaan, prosedur-prosedur dan program-program". Menurut Malayu S.P Hasibuan "Perencanaan adalah pekerjaan mental untuk memilih sasaran, kebijakan, prosedur, dan program yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan pada masa yang akan datang". Menurut T. Hani Handoko "Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi, dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan". Manajer dalam fungsi perencanaan harus mengkaji dan mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum memutuskan

karena ini adalah langkah awal yang bisa berpengaruh secara total dalam organisasi kedepannya. Fungsi-fungsi manajemen yang lain tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya perencanaan yang matang. Jika dipahami lebih lanjut, perencanaan memiliki beberapa tahapan kegiatan agar tersusun dengan baik.

Kegiatan Fungsi Perencanaan (1) Menetapkan arah tujuan dan target organisasi. (2) Menyusun strategi untuk mencapai tujuan. (3) Menentukan sumber daya yang dibutuhkan. (4) Menetapkan standar kesuksesan dalam upaya mencapai tujuan. (b) Pembagian Perencanaan Perencanaan dari sudut pandang jenjang manajemen bisa dibagi kedalam beberapa jenjang: (1) Top Level Planning (Perencanaan Jenjang Atas) Perencanaan dalam jenjang ini bersifat strategis. Jenjang atas ini memberikan petunjuk umum, rumusan tujuan, pengambilan keputusan serta memberikan petunjuk pola penyelesaian dan sifatnya menyeluruh. Top level planning menekankan tujuan jangka panjang organisasi dan tentu saja menjadi tanggung jawab manajemen puncak. (2) Middle Level Planning (Perencanaan Jenjang Menengah) Jenjang perencanaan menengah sifatnya lebih administratif. Jenjang menengah menyiapkan cara-cara yang akan ditempuh untuk merealisasikan tujuan dari sebuah perencanaan dijalankan. Tanggung jawab perencanaan middle level berada pada manajemen menengah.

Adapun unsur-unsur pertanyaan yang meliputi indikator Pemimpin Sebagai Penentu Arah yaitu:

1. Perumusan Strategi
2. Pengambilan Keputusan

3. Memberi Motivasi

Untuk lebih jelasnya mengenai tentang Perencanaan maka dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel V.4 Tanggapan Responden Kaur Umum dan Staf Desa Berdasarkan indikator Perencanaan.

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang baik	
1	Perumusan strategi	5 (71%)	2 (27%)	-	7 (100%)
2	Penambilan keputusan	6 (86%)	1 (14%)	-	7 (100%)
3	Memberikan motivasi	6 (86%)	1 (14%)	-	7 (100%)
Jumlah		17	4	-	21
Rata-rata		6	1	-	7
Presesntase		86%	14%	-	100%

Dari tabel V.4 dapat diketahui bahwa tanggapan responden kaur umum dan staf desa, berdasarkan Perencanaan. terhadap indikator yang diatas dengan item yang dinilai mengenai sub indikator Perumusan Strategi dalam menjalankan fungsi kepemimpinan atau proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan desa, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan pelayanan terbaik, untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 5 orang dengan presentase 71%, sedangkan untuk penilaian cukup baik sebanyak 2 orang dengan presentase 27%, dan kategori kurang baik tidak ada.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai sub indikator Pengambilan Keputusan mengenai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang

membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan diantara beberapa alternative yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan suatu pilihan final. Keluarannya bisa berupa suatu tindakan (aksi) atau suatu opini terhadap pilihan. Dan untuk kategori penilaian Baik sebanyak 6 orang dengan presentase 86% dan sebanyak 1 orang atau dalam presentase 14% Pegawai yang mengatakan Cukup Baik, dan juga yang mengatakan Kurang Baik tidak ada.

Dan pada item ketiga yaitu mengenai memberikan motivasi yakni antara keinginan dan enenrgi untuk mencapai tujuan tertentu, karena fungsi utama kepemimpinan adalah untuk memimpin, maka kemampuan untuk mempengaruhi orang adalah hal yang penting. Dan responden yang mengatakan Baik sebanyak 6 orang atau dalam presentase 86%, sebanyak 1 orang atau dalam presentase 14% responden yang mengatakan cukup baik dan juga yang mengatakan kurang Baik tidak ada.

Dari data diatas berdasarkan Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dapat disimpulkan bahwa, pada indikator Pemimpin Sebagai Penentu Arah dikategorikan “Baik” yaitu berjumlah 6 orang dengan presentase 86%. Artinya Pemimpin Sebagai Penentu Arah di Desa Teluk Rhu Kabupaten Bengkalis tersebut sampai saat ini sudah memberikan motivasi dan juga program-program yang akan dijalankan di desa tersebut.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.5 Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Terhadap Indikator Perencanaan

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang baik	
1	Perumusan strategi	14 (25%)	35 (61%)	8 (14%)	57 (100%)
2	Pengambilan keputusan	10 (18%)	45 (79%)	2 (3%)	57 (100%)
3	Memberikan motivasi	15 (26%)	38 (67%)	4 (7%)	57 (100%)
Jumlah		39	118	14	171
Rata-rata		13	39	5	57
Presesntase		27%	68%	9%	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2019

Dari tabel V.5 dapat diketahui bahwa tanggapan responden Masyarakat terhadap indikator yang diatas dengan item yang dinilai mengenai Perumusan Strategi dalam menjalankan fungsi kepemimpinan atau proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan desa, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan pelayanan terbaik. Untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 14 orang dengan presentase 25%, sedangkan untuk penilaian cukup baik sebanyak 35 orang dengan presentase 61%, dan kategori kurang baik sebanyak 8 orang dengan presentase 14%.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai Pengambilan Keputusan mengenai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan diantara beberapa alternative yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan suatu pilihan final. Keluarannya bisa berupa suatu tindakan (aksi) atau suatu opini terhadap pilihan,

dan untuk kategori penilaian Baik sebanyak 10 orang dengan presentase 18% dan sebanyak 45 orang atau dalam presentase 79% masyarakat yang mengatakan Cukup Baik, dan juga masyarakat yang mengatakan Kurang Baik berjumlah 2 orang atau dalam presentase 3%.

Dan pada item ketiga yaitu mengenai Memberikan Motivasi yakni antara keinginan dan energi untuk mencapai tujuan tertentu, karena fungsi utama kepemimpinan adalah untuk memimpin, maka kemampuan untuk mempengaruhi orang adalah hal yang penting. Dan untuk responden masyarakat yang mengatakan Baik sebanyak 15 orang atau dalam presentase 26%, sebanyak 38 orang atau dalam presentase 67% masyarakat yang mengatakan cukup baik dan juga masyarakat yang mengatakan kurang baik sebanyak 4 orang atau dengan presentase 7%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, pada indikator Pemimpin Sebagai Penentu Arah dikategorikan “Cukup Baik” yaitu berjumlah 39 orang dengan presentase 68%. Berdasarkan Pemimpin Sebagai Penentu Arah sudah dapat dinilai Cukup baik karena perumusan strategi, pengambilan keputusan serta memberikan motivasi sudah dijalankan dengan “Cukup baik”.

Berdasarkan wawancara Kepada Bapak Sayugi selaku Kepala Desa, beliau mengatakan bahwa :

“Arah yang ditempuh oleh organisasi menuju tujuannya harus sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan pemanfaatan dari segala sarana dan prasarana yang tersedia itu. Arah yang dimaksud tertuang dalam strategi dan taktik yang

disusun dan dijalankan oleh organisasi yang bersangkutan. Adapun beberapa strategi yang dilakukan kepala desa seperti, Membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan terhadap masyarakat yang ada di desa tersebut”.

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak Elfian Manurung selaku Sekretaris desa beliau mengataakan bahwa :

“Setiap pemimpin harus mempunyai strategi dan taktik yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seorang Kepala Desa juga pasti mempunyai strategi dan taktik tersendiri dalam berusaha mewujudkan tujuan mereka dengan terlebih dahulu mempertimbangkan kondisi dan keadaan yang ada dengan faktor yang ada. Apabila Kepala Desa tidak mempunyai startegi dan taktik tersendiri akan sulit menjalankan kepemimpinannya khususnya bila terjadi tantangan, hambatan atau perubahan.”

Berdasarkan wawancara bersama Bapak H. Syuhadak selaku BPD desa Kota Bangun, beliau mengatakan bahwa :

“Menurut saya, strategi dan taktik yang dilakukan beliau itu Cuma mengadakan sosialisasi ke masyarakat saja, artinya semua program dari masyarakat itu adalah wadah dari program yang mendukung dari program yang dibuat oleh kabupaten. Dan mengajak masyarakat mendukung untuk setiap program dari pemerintah jadi masyarakat ini Cuma menerima program itu.”

Dilanjutkan wawancara bersama bapak Wahyudin selaku Ketua LKMD/LPM, beliau mengatakan bahwa :

“Apabila kami rapat atau ingin mengambil keputusan bapak kepala desa sebagai pemegang kedudukan tertinggi untuk mengambil suatu keputusan. Kami selalu menghormati keputusan beliau karna setiap keputusan yang diambil telah mempertimbangkan banyak hal sebelumnya.”

Dilanjutkan wawancara bersama bapak andy selaku masyarakat desa, beliau mengatakan bahwa :

“ Mengenai pemimpin selaku penentu arah kepala desa sampai saat ini belum memberikan motivasi ataupun program-program yang akan dijalankan, ya kami sebagai masyarakat biasanya hanya ikut saja apa yang di jalankan oleh kepala desa, selagi dalam hal yang positive kami ikut saja dek, tapi kalau musyawarah bersama mengenai program yang akan dijalankan kami tidak pernah diundang dek, paling Cuma atasan nya saja dek”.

Berdasarkan Hasil Kuisisioner dan wawancara mengenai Pemimpin Sebagai Penentu Arah mengenai Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang dinilai dari beberapa indikator dapat digolongkan kedalam kategori “Cukup Baik”. Artinya Perencanaan di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar tersebut yakni strategi dan taktik yang dilakukan beliau itu hanya mengadakan sosialisasi ke masyarakat saja, artinya semua program dari masyarakat itu adalah wadah dari program yang mendukung dari program yang dibuat oleh kabupaten. Dan mengajak masyarakat mendukung untuk setiap program dari pemerintah jadi masyarakat ini hanya menerima program tersebut.

Demikian berdasarkan data dilapangan hasil observasi dapat dilihat melauli tabbel berikut :

Tabel V.6 Hasil Observasi Tentang Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun

No	Uraian	Keterangan
1	Objek Yang Daiamati	1. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
2	Bentuk Kegiatan	2. Perencanaan tanaman apotik hidup di perkarangan rumah
3	Waktu Kegiatan	3. Hari : Minggu Tanggal : 13 Desember Jam :10 Wib
4	Tempat Kegiatan	4. Balai Desa Kota Bangun
5	Peserta Yang Dilibatkan	5. Kelompok PKK Dan PNS, masyarakat
6	Hasil Observasi	6. Terlihat Ada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tetapi Tidak Banyak

2. Pengorganisasian

Kebijaksanaan dan kegiatan organisasi perlu dijelaskan kepada pihak luar agar pihak tersebut mempunyai pengetahuan yang tepat tentang kehidupan organisasi yang bersangkutan, dan yang paling bertanggung jawab sebagai organisasi dalam hubungan dengan berbagai pihak tersebut adalah pimpinan organisasi. Pimpinan perlu mengetahui keputusan lain yang telah dibuat oleh pimpinan yang lebih rendah. Serta pengetahuan tentang berbagai kegiatan yang berlangsung dalam organisasi sebagai pelaksanaan dari berbagai keputusan yang telah diambil.

Dalam organisasi yang bersifat formal, tidak semua anggota organisasi memiliki wewenang untuk melakukan hubungan keluar dengan pihak atau organisasi lain, bahkan tidak pada semua tingkat jabatan pimpinan. Pada analisa terakhir, pemimpin puncak organisasilah yang menjadi wakil dan juru bicara resmi organisasi. Sebagai pemimpin resmi organisasi, fungsi pimpinan tidak terbatas pada pemeliharaan hubungan baik saja, tetapi harus membuahkan perolehan dukungan yang perlu dilakukan oleh organisasi dalam usaha pencapaian tujuan dan berbagai sarannya.

Pimpinan sebagai organisasi, pimpinan puncak organisasilah yang menjadi pimpinan resmi organisasi dalam hubungan dengan berbagai pihak diluar organisasi. Fungsi pimpinan tidak terbatas pada pemeliharaan hubungan baik saja, tapi harus membuahkan perolehan dukungan yang diperlukan oleh organisasi dalam usaha pencapaian tujuan dan berbagai sarannya.

Adapun unsur-unsur pertanyaan Pengorganisasian yang meliputi indikator yaitu:

1. Membentuk suasana organisasi yang baik

2. Pemeliharaan hubungan didalam organisasi
3. Pemeliharaan hubungan diluar organisasi

Untuk lebih jelasnya mengenai tentang Pengorganisasian maka dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel V.6 Tanggapan Responden Kaur Umum Dan Staf Desa Berdasarkan Pemimpin Pengorganisasian

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang baik	
1	2	3	4	5	6
1	Membentuk suasana organisasi	5 (71%)	2 (29%)	-	7 (100%)
2	Pemeliharaan hubungan didalam organisasi	6 (86%)	1 (14%)	-	7 (100%)
3	Pemeliharaan hubungan diluar organisasi	4 (57%)	3 (43%)	-	7 (100%)
Jumlah		15	6	-	21
Rata-rata		5	2	-	7
Presesntase		71%	29%	-	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2021

Dari tabel V.6 dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap indikator Pengorganisasian dengan item yang dinilai mengenai Membentuk suasana organisasi yaitu terdapat pihak-pihak yang saling terkait antara lain pemimpin sebagai atasan dan pegawai atau karyawan sebagai bawahan. Maka untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 5 orang dengan presentase 71%, sedangkan untuk penilaian cukup baik sebanyak 2 orang dengan presentase 29%, dan kategori kurang baik tidak ada.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai Pemeliharaan Hubungan yakni usaha pemeliharaan hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan di luar organisasi dan didalam organisasi, untuk kategori penilaian Baik sebanyak 6 orang dengan presentase 86% dan sebanyak 1 orang atau dalam presentase 14% yang mengatakan Cukup Baik, dan juga yang mengatakan Kurang Baik tidak ada.

Dan pada item ketiga yaitu, responden yang mengatakan Baik sebanyak 4 orang atau dalam presentase 57%, sebanyak 3 orang atau dalam presentase 43% yang mengatakan cukup baik dan juga yang mengatakan kurang Baik tidak ada.

Dari data diatas dapat disimpulkan Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, pada indikator Pengorganisasian dikategorikan “Baik” yaitu berjumlah 7 orang dengan presentase 64%. Artinya lembaga kemasyarakatan desa, bersama kepala desa sebagai kepala organisasi kepada masyarakat sudah berjalan dengan yang semestinya serta dengan organisasi diluar itu juga sudah berjalan dengan baik.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap indikator Pengorganisasian mengenai Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.7 Tanggapan Responden Masyarakat Berdasarkan Pemimpin Sebagai Wakil Dan Juru Bicara

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang	

				baik	
1	Membentuk suasana organisasi	9 (16%)	44 (77%)	4 (7%)	57 (100%)
2	Pemeliharaan hubungan didalam organisasi	5 (9%)	49 (86%)	3 (5%)	57 (100%)
3	Pemeliharaan hubungan diluar organisasi	6 (11%)	48 (84%)	3 (5%)	57 (100%)
	Jumlah	20	141	10	171
	Rata-rata	7	47	3	57
	Presesntase	12%	83%	5%	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2021

Dari tabel V.7 dapat diketahui bahwa tanggapan responden Masyarakat terhadap indikator Pengorganisasian dengan item yang dinilai mengenai membentuk suasana organisasi yaitu terdapat pihak-pihak yang saling terkait antara lain pemimpin sebagai atasan dan pegawai atau karyawan sebagai bawahan. Dan untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 9 orang dengan presentase 16%, sedangkan untuk penilaian cukup baik sebanyak 44 orang dengan presentase 77%, dan kategori kurang baik sebanyak 4 orang dengan presentase 7%.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai pemeliharaan hubungan didalam organisasi yakni usaha pemeliharaan hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan di luar organisasi dan didalam organisasi . Dan untuk kategori penilaian Baik sebanyak 5 orang dengan presentase 9% sebanyak 49 orang atau dalam presentase 86% masyarakat yang mengatakan Cukup Baik, dan juga masyarakat yang mengatakan Kurang Baik sebanya 3 orang atau dalam presentase 5%.

Dan pada item ketiga yaitu Pemeliharaan hubungan diluar organisasi yakni usaha pemeliharaan hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan di luar

organisasi. Responden yang mengatakan Baik sebanyak 6 orang atau dalam presentase 11%, sebanyak 48 orang atau dalam presentase 84% masyarakat yang mengatakan cukup baik dan juga masyarakat yang mengatakan kurang baik sebanyak 3 orang atau dengan presentase 5%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, pada indikator Pengorganisasian dikategorikan “Cukup Baik” yaitu berjumlah 47 orang dengan presentase 83%. Artinya masyarakat biasa hanya mengikuti apa saja yang menjadi program-program yang akan dijalankan, mengenai hubungan didalam atau diluar organisasi masyarakat juga kurang mengetahui, karena jika ada rapat-rapat desa tidak semua masyarakat yang dilibatkan.

Berdasarkan wawancara Kepada Bapak Sayugi selaku Kepala Desa, beliau mengatakan bahwa :

“Sebagai Kepala Desa memang harus dituntut atau memang harus memiliki skill dalam berbicara, berbicara mengenai apa? Ya itu tadi dek berbicara mengenai program-program yang akan dijalankan, bersama organisasi-organisasi yang lainnya, seperti BPD ataupun bersama LKMD/LPM, pastinya setiap ada program-program yang akan dijalankan pasti kami selalu bermusyawarah terlebih dahulu”.

Berdasarkan wawancara Kepada Bapak Elfian Manurung selaku Sekretaris, beliau mengatakan bahwa :

“Memang sudah seharusnya Kepala Desa memang harus dituntut atau memiliki skill dalam berorganisasi apabila ada program-program yang akan dijalankan pasti kami selalu bermusyawarah terlebih dahulu”.

Dilanjutkan wawancara bersama bapak Wahyudin selaku Ketua LKMD/LPM, beliau mengatakan bahwa :

“Kami selaku lembaga kemasyarakatan desa, bersama kepala desa sebagai pimpinan organisasi kepada masyarakat menurut saya sudah berjalan dengan yang semestinya ya dek, hubungan dengan organisasi luar itu juga sudah berjalan dengan baik dek”.

Berdasarkan wawancara bersama H. Syuhadak selaku BPD, beliau mengatakan bahwa :

“Mengenai pemimpin selaku ketua organisasi saya rasa sudah berjalan dengan baik ya dek, tentunya kalau ada program-program yang akan dijalankan pasti selalu bermusyawarah terlebih dahulu dan juga kepala desa saya rasa sudah maksimal mengenai pemeliharaan hubungan diluar serta diluar organisasi”

Dilanjutkan wawancara bersama masyarakat desa, beliau mengatakan bahwa :

“Kami sebagai masyarakat biasa ya hanya mengikuti saja apa program-program yang akan dijalankan dek, mengenai hubungan didalam atau diluar organisasi kami kurang tau ya dek, soalnya kalau ada rapat-rapat desa tidak semua masyarakat yang dilibatkan dek, hanya sebagaian orang saja yang dilibatkan dek.”

Berdasarkan hasil observasi dilapangan mengenai pengorganisasian mengenai Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sudah berjalan dengan baik, hanya saja berdasarkan tanggapan masyarakat masih ditemui hambatan-hambatan yaitu tidak dilibatkan atau diikut sertakan seluruh masyarakat mengenai program-program yang akan dijalankan, sehingga pengorganisasian dirasa belum efektif dalam menjalankan tugasnya.

3. Penggerakan

Fungsi manajemen tidak akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya unsur penggerakan atau pengarahan, sebagai tindak lanjut dari proses perencanaan, pengorganisasian, dan sampai ke proses penggerakan. G.R Terry (dikutip Malayu S.P. Hasibuan) dalam bukunya “Principle of Management” mengatakan “Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts. “Artinya : Pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerjasama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha usaha pengorganisasian.

Fungsi pengarahan selalu berkaitan erat dengan perencanaan. Perencanaan menentukan kombinasi yang paling baik dari faktor-faktor, kekuatan-kekuatan, sumber daya-sumber daya dan hubungan-hubungan yang diperlukan untuk mengarahkan dan memotivasi karyawan. Fungsi pengarahan meliputi penerapan unsur-unsur tersebut menjadi pengaruh. Fungsi penggerakan atau pengarahan adalah upaya untuk menciptakan suasana kerja dinamis, sehat agar kinerjanya lebih efektif dan efisien.

Beberapa kegiatan pada fungsi pengarahan :

- a. Membimbing dan memberi motivasi kepada pengurus supaya bisa bekerja secara efektif dan efisien.
- b. Memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang tugas.
- c. Menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan.
- 4) Pengawasan (Controlling) Untuk mengetahui

berhasil tidaknya suatu tujuan yang ingin dicapai harus dilakukann pengawasan atau pengendalian, karena walaupun perencanaan, pengorganisasian, penggerakannya baik, tetapi apabila pelaksana kerja tidak teratur, tertib dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai.

Dibawah ini adalah beberapa pandangan mereka tentang pengawasan, antara lain : Harold Koontz (dikutip Malayu S.P. Hasibuan) dalam buku Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah menjelaskan “Control is the measurement and correction of the performance of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to attain then are accomplished”. “Artinya : pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara”. Menurut T. Hani Handoko Pengawasan (Controlling) adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Melihat definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan tindakan-tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja agar segala kegiatan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, petunjuk-petunjuk dan intruksi-intruksi, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pengawasan atau controlling bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan tugas/pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan menyangkut kegiatan membandingkan antara hasil nyata yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan, dan apabila pelaksanaannya menyimpang dari rencana, maka perlu diadakan koreksi seperlunya.

Adapun unsur-unsur pertanyaan yang meliputi indikator Penggerakan yaitu:

1. Mampu menjelaskan
2. Mampu mempengaruhi
3. Mampu menyatukan

Untuk lebih jelasnya mengenai tentang penggerakan maka dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel V.8 Tanggapan Responden Kaur Umum dan Staf Desa Berdasarkan Penggerakan.

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang baik	
1	Mampu menjelaskan	6 (86%)	1 (14%)	-	7 (100%)
2	Mampu mempengaruhi	5 (71%)	2 (29%)	-	7 (100%)
3	Mampu menyatukan	4 (57%)	3 (43%)	-	7 (100%)
Jumlah		15	6	-	21
Rata-rata		5	2	-	7
Presentase		71%	29%	-	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2021

Dari tabel V.8 dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap indikator Penggerakan dengan item yang dinilai mengenai Pemimpin Mampu Menjelaskan yakni sebuah kemampuan seorang pemimpin yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa menjelaskan kepada orang lain atau memandu pihak tertentu atau masyarakat untuk menjalankan program-program yang akan dilaksanakan di desa Kota Bangun tersebut. Untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 6 orang dengan presentase 86%, sedangkan untuk penilaian cukup baik sebanyak 1

orang dengan presentase 14%, dan kategori kurang baik tidak ada tanggapan dari responden.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai Pemimpin Mampu mempengaruhi yakni sebuah kemampuan seorang pemimpin yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu atau masyarakat untuk menjalankan program-program yang akan dilaksanakan di desa Kota Bangun tersebut. Untuk kategori penilaian Baik sebanyak 5 orang dengan presentase 71% dan sebanyak 2 orang atau dalam presentase 29% responden yang mengatakan Cukup Baik, dan juga responden yang mengatakan Kurang Baik tidak ada.

Dan pada item ketiga yaitu mengenai Mampu Menyatukan yakni mempersatukan masyarakat di Desa Kota Bangun tersebut. Persatuan itu sedemikian penting. Bahkan menjadi syarat keberhasilan sebuah organisasi. Tanpa persatuan tidak akan mungkin tujuan bersama bisa diraih. Maka responden yang mengatakan Baik sebanyak 4 orang atau dalam presentase 57%, dan pegawai yang mengatakan cukup baik sebanyak 3 orang atau dalam presentase 43%, dan juga yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, pada indikator Pemimpin sebagai komunikator dikategorikan “Baik” yaitu berjumlah 9 orang dengan presentase 82%. Artinya Kunci yang paling penting yang harus dimiliki setiap pemimpin adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Begitu juga kepala desa memang harus

dituntut untuk mampu menjelaskan mengenai program-program yang akan dijalankan di desa Kota Bangun tersebut.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap indikator pemimpin sebagai komunikator mengenai Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.9 Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Penggerakan

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang baik	
1	Mampu menjelaskan	9 (16%)	45 (79%)	3 (5%)	57 (100%)
2	Mampu mempengaruhi	10 (18%)	43 (75%)	4 (7%)	57 (100%)
3	Mampu menyatukan	10 (18%)	38 (66%)	9 (16%)	57 (100%)
Jumlah		29	126	16	171
Rata-rata		10	42	5	57
Presentase		17%	74%	9%	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2021

Dari tabel V.9 dapat diketahui bahwa tanggapan responden Masyarakat terhadap indikator Penggerakan dengan item yang dinilai mengenai Pemimpin mampu menjelaskan Menjelaskan yakni sebuah kemampuan seorang pemimpin yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa menjelaskan kepada orang lain atau memandu pihak tertentu atau masyarakat untuk menjalankan program-program yang akan dilaksanakan di desa Kota Bangun tersebut. Untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 19 orang dengan presentase 16%, sedangkan untuk penilaian cukup baik sebanyak 45 orang dengan presentase 79%, dan kategori kurang baik sebanyak 3 orang dengan presentase 5%.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai Mampu Mempengaruhi yakni sebuah kemampuan seorang pemimpin yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu atau masyarakat untuk menjalankan program-program yang akan dilaksanakan di desa tersebut. Untuk kategori penilaian Baik sebanyak 10 orang dengan presentase 18% dan sebanyak 43 orang atau dalam presentase 75% responden yang mengatakan Cukup Baik, dan juga masyarakat yang mengatakan Kurang Baik sebanyak 4 orang atau dalam presentase 7%.

Dan pada item ketiga yaitu mengenai mampu menyatukan yakni mempersatukan masyarakat di desa kota bangun tersebut. Persatuan itu sedemikian penting. Bahkan menjadi syarat keberhasilan sebuah organisasi. Tanpa persatuan tidak akan mungkin tujuan bersama bisa diraih. Dan yang mengatakan Baik sebanyak 10 orang atau dalam presentase 18%, sebanyak 38 orang atau dalam presentase 66% masyarakat yang mengatakan cukup baik dan juga masyarakat yang mengatakan kurang baik sebanyak 9 orang atau dengan presentase 16%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, pada indikator Penggerakan dikategorikan “Baik” yaitu berjumlah 9 orang dengan presentase 82%. Artinya sampai saat ini belum maksimal mengenai pemimpin sebagai komunikator, karena kepala desa selalu sibuk, dan apabila masyarakat ada keperluan sering diwakilkan dengan sekretarisnya, dan juga seperti gotong royong juga sudah jarang dilakukan untuk sekarang ini.

Berdasarkan wawancara Kepada Bapak Sayugi selaku Kepala Desa, beliau mengatakan bahwa :

“Kunci yang paling penting yang harus dimiliki setiap pemimpin adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Tidak jarang pemimpin yang mempunyai visi atau misi yang besar gagal menyampaikan visi dan misi yang ia inginkan kepada anak buahnya atau teamnya karena ketidak mampuan berkomunikasi dengan baik sehingga teamnya kehilangan arah, begitu juga kepala desa memang harus dituntut untuk mampu menjelaskan mengenai program-program yang akan dijalankan di desa Kota Bangun tersebut.”

Berdasarkan wawancara Kepada Bapak Elfian Manurung selaku Sekretaris, beliau mengatakan bahwa :

“Kepala desa memang harus dituntut untuk mampu menjelaskan mengenai program-program yang akan dijalankan di desa tersebut, memberi arahan kepada masyarakat serta dapat berkomunikasi dengan baik kepada Pegawai di kantor desa tersebut, agar tujuan untuk membangun desa tersebut dapat berjalan dengan maksimal.”

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak H. syuhadak selaku BPD beliau mengatakan bahwa :

“Interaksi terhadap bawahan didalam Kantor sebenarnya sudah dapat dikatakan baik. Namun interaksi diluar Kantor Desa, kurang berusaha kedekatan personal dengan bawahannya dalam upaya menciptakan keharmonisan dan suasana kerja yang nyaman bagi bawahannya”

Berdasarkan wawancara bersama bapak wahyudin selaku Ketua LKMD/LPM, beliau mengatakan bahwa :

“ Mengenai Pemimpin sebagai penggerakan dirasa belum cukup maksimal ya dek, contohnya saja hubungan diluar desa masih kurang maksimal dan juga program-program yang akan dijalankan juga masih belum maksimal dek seperti acara pantai yang setaip tahunnya diadakan sekarang sudah tidak berjalan lagi dek”

Dilanjutkan wawancara bersama masyarakat desa, beliau mengatakan bahwa :

“Sebagai kepala desa memang harus dituntut untuk mampu mempengaruhi dan juga mengajak masyarakat serta lembaga lembaga yang lainnya untuk menjalankan program demi kemajuan desanya, akan tetapi sampai saat ini belum maksimal ya dek pemimpin sebagai komunikator, soalnya kepala desa selalu sibuk, paling kalau kami ada urusan yang penting juga sering diwakilkan sama sekretarisnya dek, dan juga seperti gotong royong juga sudah jarang dilakukan dek sekarang ini.”

Dan berdasarkan observasi peneliti dilapangan mengenai Pemimpin Selaku Komunikator Kepala Desa selaku penggerak yang efektif dapat dikatakan kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari Interaksi terhadap bawahan didalam Kantor sebenarnya sudah dapat dikatakan baik. Namun interaksi diluar Kantor Desa kurang berusaha kedekatan personal dengan bawahannya dalam upaya menciptakan keharmonisan dan suasana kerja yang nyaman bagi bawahannya. Kepala Desa mampu mengkomunikasi dengan baik setiap hal yang menjadi arahan dan informasi terhadap bawahannya sehingga bawahannya mengerti setiap instruksi yang diberikan oleh Kepala Desa. Namun untuk komunikasi diluar Kantor Desa masih kurang baik.

4. Pengawasan

Pengawasan juga dilakukan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu kegiatan. Dari pengawasan ini diharapkan agar kesalahan yang telah di perbuat oleh seseorang dapat diperbaiki. Fungsi pengendalian adalah upaya untuk menilai suatu kinerja yang berpatokan kepada standar yang telah dibuat, juga melakukan perbaikan apabila memang dibutuhkan. Kegiatan pada fungsi pengendalian misalnya: a. Mengevaluasi keberhasilan dan target dengan cara mengikuti standar indikator yang sudah ditetapkan. b. Melakukan klarifikasi dan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan. c. Memberi alternatif solusi yang mungkin bisa

mengatasi masalah yang terjadi. Controlling akan berjalan efektif dengan memperhatikan hal-hal berikut : a. Routing (jalur), manajer menetapkan cara atau jalur supaya bisa dengan mudah mengetahui letak dimana suatu kesalahan sering terjadi Scheduling (penetapan waktu), Manajer menetapkan kapan semestinya pengawasan harus dijalankan.

Kadang-kadang, pengawasan yang terjadwal mungkin tidak efisien dalam menemukan suatu kesalahan, dan sebaliknya, sesuatu yang dijalankan secara mendadak malah lebih berguna. c. Dispatching (perintah pelaksanaan), adalah pengawasan yang berupa suatu perintah pelaksanaan pada pekerjaan. Tujuannya supaya suatu pekerjaan bisa selesai tepat waktu. Perintah bisa membuat sebuah pekerjaan bisa terhindar dari kondisi yang terkatung katung, dan pada ujungnya apabila terjadi kesalahan, bisa dengan mudah diidentifikasi siapa yang melakukan kesalahan. Follow Up (tindak lanjut), Manajer mencari solusi apabila terdapat kesalahan yang ditemukan.

Tindak lanjut bisa dengan memberikan peringatan terhadap pihak yang sengaja atau tidak sengaja melakukan kesalahan dan memberikan petunjuk supaya kesalahan yang sama tidak akan terulang kembali. Bentuk pengawasan yang baik adalah pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan dan sifat atau karakter dari perusahaan. Sebuah pengawasan yang baik dilakukan dengan tidak menelan banyak biaya dan bisa menjamin adanya kegiatan perbaikan. Untuk itu, perusahaan perlu menyiapkan langkah tata pola dan rencana perusahaan sebelum pengawasan dilaksanakan

Adapun unsur-unsur pertanyaan yang meliputi indikator Pengawasan yaitu:

1. Mampu menyatukan persepsi
2. Mampu menghilangkan perbedaan
3. Adanya satu tindakan

Untuk lebih jelasnya mengenai tentang Pengawasan maka dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel V.10 Tanggapan Responden Kaur Umum dan Staf Desa Berdasarkan Indikator Pengawasan

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang baik	
1	Mampu menyatukan persepsi	5 (71%)	2 (29%)	-	7 (100%)
2	Mampu menghilangkan perbedaan	6 (86%)	1 (14%)	-	7 (100%)
3	Adanya satu tindakan	3 (43%)	4 (57%)	-	7 (100%)
Jumlah		14	7	-	21
Rata-rata		5	2	-	7
Presentase		71%	29%	-	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2021

Dari tabel V.10 dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap indikator Pengawasan dengan item yang dinilai mengenai mampu menyatukan persepsi yakni pemimpin desa perlu mengetahui tanda-tanda awal konflik terjadinya konflik, yaitu dengan melihat peningkatan intensitas ketidak sepakatan diantara anggota-anggota dalam suatu organisasi, maka untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 5 orang dengan presentase 71%, sedangkan untuk penilaian cukup baik sebanyak 2 orang dengan presentase 29%, dan kategori kurang baik tidak ada tanggapan dari responden.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai mampu menghilangkan perbedaan atau kepala desa mampu menyelesaikan konflik yang ada di Desa tersebut agar tercapainya tujuan desa yang aman dan tentram. Maka untuk kategori penilaian Baik sebanyak 6 orang dengan presentase 86% dan sebanyak 1 orang atau dalam presentase 14% responden yang mengatakan Cukup Baik, dan juga responden yang mengatakan Kurang Baik tidak ada.

Pada item Ketiga yang dinilai mengenai adanya suatu tidakan yakni cara penyelesaian sengketa atau konflik melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Maka untuk kategori penilaian Baik sebanyak 3 orang dengan presentase 43% dan sebanyak 4 orang atau dalam presentase 57% responden yang mengatakan Cukup Baik, dan juga responden yang mengatakan Kurang Baik tidak ada.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, pada indikator Mampu menyatukan presepsi “Baik” yaitu berjumlah 5 orang dengan presentase 71%. Artinya Peranan pimpinan di Desa dalam suatu organisasi telah dijalankan dengan baik, karena keberadaan pimpinan yaitu menjadi palang pintu atau menjadi salah satu ujung tombak keberhasilan dalam berorganisasi. Salah satu tugas atau pemimpin yaitu harus bisa mengelola konflik dalam organisasi yang dipimpinnya sehingga setiap konflik itu bisa diselesaikan dengan baik dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap indikator pengawasan, mengenai Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang

Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.11 Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Pengawasan

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang baik	
1	Mampu menyatukan presepsi	8 (14%)	45 (79%)	4 (7%)	57 (100%)
2	Mampu menghilangkan perbedaan	9 (16%)	43 (75%)	5 (9%)	57 (100%)
3	Adanya satu tindakan	5 (9%)	48 (84%)	4 (7%)	57 (100%)
Jumlah		22	136	13	171
Rata-rata		7	45	4	57
Presesntase		12%	81%	7%	100%

Sumber : Data Olahan lapangan, 2021

Dari tabel V.11 dapat diketahui bahwa tanggapan responden Masyarakat terhadap indikator mengenai Pengawasan dengan item yang dinilai mengenai Mampu Menyatukan Presepsi yakni pemimpin desa perlu mengetahui tanda-tanda awal konflik terjadinya konflik, yaitu dengan melihat peningkatan intensitas ketidaksepakatan diantara anggota-anggota dalam suatu organisasi, dalam Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar untuk kategori penilaian Baik adalah sebanyak 8 orang dengan presentase 14%, sedangkan untuk penilaian cukup baik sebanyak 45 orang dengan presentase 79%, dan kategori kurang baik sebanyak 4 orang dengan presentase 7%.

Pada item Kedua yang dinilai mengenai Mampu Menghilangkan Perbedaan yakni pemimpin atau kepala desa mampu menyelesaikan konflik yang ada di Desa tersebut agar tercapainya tujuan desa yang aman dan tentram. Maka untuk kategori penilaian Baik sebanyak 9 orang dengan presentase 16% dan sebanyak 43 orang atau dalam presentase 75% masyarakat yang mengatakan Cukup Baik, dan juga masyarakat yang mengatakan Kurang Baik sebanyak 5 orang atau dalam presentase 9%.

Pada item Ketiga yang dinilai mengenai adanya suatu tindakan cara penyelesaian sengketa atau konflik melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, maka untuk kategori penilaian Baik sebanyak 5 orang dengan presentase 9% dan sebanyak 48 orang atau dalam presentase 84% masyarakat yang mengatakan Cukup Baik, dan juga masyarakat yang mengatakan Kurang Baik sebanyak 4 orang atau dalam presentase 7%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, pada indikator Pemimpin Selaku Mediator dikategorikan “Cukup Baik” yaitu berjumlah 45 orang dengan presentase 81%. Artinya Pada desa Kota Bangun, Kepala Desa selaku mediator yang andal, khususnya dalam hubungan terutama dalam menangani situasi konflik dapat dikatakan kurang baik. Hal ini dapat dilihat Kepala Desa yang belum peka apabila terjadi konflik kepada masyarakatnya hal ini membuat setiap konflik yang ada di masyarakatnya akan sulit untuk diselasikan oleh Kepala Desa

Berdasarkan wawancara Kepada Bapak Sayugi selaku Kepala Desa, beliau mengatakan bahwa :

“Pembahasan tentang fungsi pimpinan sebagai mediator difokuskan pada penyelesaian situasi konflik yang mungkin timbul dalam hubungan keluar dihadapi dan diatasi. Dalam sebuah organisasi, dapat saja terjadi konflik baik antara individu yang tergabung dalam satu kelompok kerja, maupun antara berbagai kelompok yang terdapat dalam organisasi. Mengatasi konflik tersebut, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik atau sebagai mediator dalam penyelesaian konflik tersebut”

Berdasarkan wawancara Kepada Bapak Elfian Manurung selaku Sekretaris, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam mengatasi konflik tersebut, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik atau sebagai mediator dalam penyelesaian konflik tersebut, dan untuk penilaian Pemimpin Sebagai Mediator di Desa Kota Bangun dirasa sudah berjalan dengan baik, karena setiap ada permasalahan di Desa ini selalu diselesaikan dengan baik dan dengan cara mediasi.”

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak H. Syuhadak selaku BPD , beliau mengatakan bahwa :

“Peranan pimpinan dalam suatu organisasi sangatlah penting karena keberadaan pimpinan yaitu menjadi palang pintu atau menjadi salah satu ujung tombak keberhasilan dalam berorganisasi. Salah satu tugas atau pemimpin yaitu harus bisa mengelola konflik dalam organisasi yang dipimpinnya sehingga setiap konflik itu bisa diselesaikan dengan baik dan tidak ada yang merasa dirugikan”.

Berdasarkan wawancara bersama masyarakat Desa, beliau mengatakan bahwa :

“Pada desa kota bangun, Kepala Desa selaku mediator yang andal, khususnya dalam hubungan kedalam, terutama dalam menangani situasi konflik dapat dikatakan kurang baik. Hal ini dapat dilihat Kepala Desa yang belum peka apabila terjadi konflik kepada masyarakatnya hal ini membuat setiap konflik yang ada di masyarakatnya akan sulit untuk diselasikan oleh Kepala Desa.”

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan diketahui bahwa masih adanya hambatan-hambatan yang ditemui dilapangan yaitu Pada desa Kota Bangun, Kepala Desa selaku mediator yang andal, khususnya dalam hubungan kedalam,

terutama dalam menangani situasi konflik dapat dikatakan kurang baik. Hal ini dapat dilihat Kepala Desa yang belum peka apabila terjadi konflik kepada masyarakatnya hal ini membuat setiap konflik yang ada di masyarakatnya akan sulit untuk diselasikan oleh Kepala Desa. Maka dari itu hasil kuisisioner, serta wawancara mengenai Pengawasan dapat digolongkan kedalam kategori “Cukup Baik.”

Selanjutnya hasil rekapulasi tanggapan responden masyarakat mengenai Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.14 Rekapitulasi Tanggapan Responden Kaur Umum dan Staf Desa, Mengenai Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Perencanaan	6 (86%)	1 (14%)	-	7 (100%)
2	pengorganisasian	5 (71%)	2 (29%)	-	7 (100%)
3	Penggerakan	5 (71%)	2 (29%)	-	7 (100%)
4	Pengawasan	5 (71%)	2 (29%)	-	7 (100%)
Jumlah		26	9	-	35
Rata-Rata		5	2	-	7
Presentase		(71%)	(29%)	-	100%

Sumber: Data hasil olahan lapangan, 2021

Dari tabel diatas, dapat diketahui tanggapan responden Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Umum, Staf Desa, Ketua BPD Dan Ketua LKMD/ LPM

mengenai Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yaitu dilihat dari indikator perencanaan diketahui sebanyak 6 orang atau 86% mengatakan Baik, sebanyak 1 orang atau 14% yang mengatakan cukup baik dan yang mengatakan Kurang baik tidak ada. Dengan demikian kesimpulan Responden sementara terhadap indikator pengorganisasian dalam kategori Baik yaitu berjumlah 6 orang atau 86%.

Pada indikator kedua yaitu dilihat dari indikator pengorganisasian diketahui sebanyak 5 orang atau 71% yang mengatakan Baik, sebanyak 2 orang atau 29% yang mengatakan cukup baik dan yang mengatakan kurang baik tidak ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanggapan Responden Pegawai mengenai Pemimpin sebagai juru bicara berada dalam kategori Baik yaitu berjumlah 5 orang atau 71%.

Pada indikator ketiga yaitu dilihat dari indikator penggerakan diketahui sebanyak 5 orang atau 71% yang mengatakan baik, sebanyak 2 orang atau 29% yang mengatakan cukup baik dan yang mengatakan kurang baik tidak ada. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sementara terhadap indikator pengetahuan mengenai pekerjaan dalam kategori Baik yaitu berjumlah 5 orang atau 71%.

Pada indikator keempat yaitu dilihat dari indikator pengawasan diketahui sebanyak 5 orang atau 71% yang mengatakan baik, sebanyak 2 orang atau 29% yang mengatakan cukup baik, dan yang mengatakan kurang baik tidak ada.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sementara mengenai Responden dalam Kategori Baik yaitu berjumlah 5 orang atau 71%.

Dari rekapitulasi Tanggapan seluruh responden Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, untuk kategori Baik yaitu berjumlah 5 orang atau dalam presentase 71%, untuk kategori Cukup Baik yaitu 2 orang atau dalam presentase 29%, dan juga untuk kategori kurang baik tidak ada.

Data diatas merupakan hasil dari seluruh jawaban responden mengenai Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk penelitian ini dikategorikan “Baik” dengan Presentase 71% sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang presentase 67%-100% termasuk dalam kategori Baik, artinya Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sudah berjalan dengan baik dan segala tugas-tugas telah dijalankan dengan baik serta pemimpin telah berusaha dengan bersungguh sungguh demi kemajuan dan juga kesejahteraan masyarakatnya.

Setelah pembahasan masing-masing indikator diatas untuk mengetahui bagaimana Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Maka dilakukan rekapitulasi jawaban responden penelitian dari responden masyarakat yang membawa peneliti dapat melihat apakah Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan

Tapung Hilir Kabupaten Kampar sudah berjalan dengan baik atau belum, dapat dilihat pada tabel rekapitulasi dibawah ini :

Tabel V.15 Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Perencanaan	13 (27%)	39 (68%)	5 (9%)	57
2	pengorganisasian	7 (12%)	47 (83%)	3 (5%)	57
3	Penggerakan	9 (16%)	45 (79%)	3 (5%)	57
4	Pengawasan	8 (14%)	45 (79%)	4 (7%)	57
Jumlah		43	222	20	285
Rata-Rata		9	44	4	57
Presentase		(16%)	(77%)	(7%)	100%

Sumber: Data hasil olahan lapangan, 2021

Dari tabel diatas, dapat diketahui tanggapan responden masyarakat mengenai Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yaitu dilihat dari perencanaan diketahi sebanyak 13 orang atau 27% mengatakan Baik, sebanyak 39 orang atau 68% yang mengatakan cukup baik dan yang mengatakan Kurang baik berjumlah 5 orang atau 9%. Dengan demikian kesimpulan Responden sementara terhadap perencanaan Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dalam kategori Cukup Baik yaitu berjumlah 39 orang atau 68%.

Pada indikator kedua yaitu dilihat dari pengorganissian bicara diketahui sebanyak 7 orang atau 12% yang mengatakan Baik, sebanyak 47 orang atau 83% yang mengatakan cukup baik dan yang mengatakan kurang baik berjumlah 3 orang atau 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanggapan Responden Pegawai mengenai pengorganisasian berada dalam kategori Cukup Baik yaitu berjumlah 47 orang atau 83%.

Pada indikator ketiga yaitu dilihat dari penggerakan diketahui sebanyak 9 orang atau 16% yang mengatakan baik, sebanyak 45 orang atau 79% yang mengatakan cukup baik dan yang mengatakan kurang baik berjumlah 3 orang atau 5%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sementara terhadap indikator pengetahuan mengenai penggerakan dalam kategori Cukup Baik yaitu berjumlah 45 orang atau 79%.

Pada indikator keempat yaitu dilihat dari pengawasan diketahui sebanyak 8 orang atau 14% yang mengatakan baik, sebanyak 45 orang atau 79% yang mengatakan cukup baik, dan yang mengatakan kurang baik berjumlah 4 orang atau 7%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sementara mengenai Responden dalam Kategori Cukup Baik yaitu berjumlah 45 orang atau 79%.

Data diatas merupakan hasil dari seluruh jawaban responden Masyarakat mengenai Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, masyarakat yang berjumlah 57 orang. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk penelitian ini dikategorikan “Cukup Baik” dengan presentase 77%. Artinya menurut responden masyarakat Kepala Desa telah menjalankan tugasnya

dengan baik, akan tetapi masih juga ditemui masalah-masalah yang terjadi di Desa Tersebut. Seperti sarana dan prasarana yang tidak dijaga dengan baik, serta Kepala Desa yang belum peka apabila terjadi konflik kepada masyarakatnya hal ini membuat setiap konflik yang ada di masyarakatnya akan sulit untuk diselesaikan oleh Kepala Desa.

Berdasarkan hasil observasi mengenai indikator perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan sudah berjalan dengan baik dan segala tugas-tugas telah dijalankan dengan baik serta pemimpin telah berusaha dengan bersungguh-sungguh demi kemajuan dan juga kesejahteraan masyarakatnya, akan tetapi tetapi masih juga ditemui masalah-masalah yang terjadi di Desa kota bangun Tersebut, yakni sarana dan prasarana yang telah dibangun atau yang sudah tersedia tidak dapat dijaga dengan baik, sehingga mengalami kerusakan-kerusakan, kurang dekatnya Kepala Desa dengan masyarakat yang ia layani dan dengan berbagai elemen yang ada di masyarakat Desa kota bangun seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat. Mengenai pemimpin selaku penentu arah kepala desa sampai saat ini telah memberikan motivasi ataupun program-program yang akan dijalankan, Mengenai pemimpin selaku wakil dan juru bicara sudah berjalan dengan baik, seperti program-program yang akan dijalankan selalu bermusyawarah terlebih dahulu dan juga kepala desa sudah maksimal mengenai pemeliharaan hubungan diluar serta diluar organisasi.

C. Faktor-Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

Pada Desa kota bangun, Kepala Desa yang menjalankan fungsi kepemimpinan yang akan ditempuh dalam usaha pencapaian tujuan dapat dikategorikan kurang baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan :

- a. Sarana dan prasarana yang tersedia tidak digunakan dengan baik, contohnya sarana dan prasarana yang telah dibangun atau yang sudah tersedia tidak digunakan dengan baik, sehingga mengalami kerusakan-kerusakan, sehingga disimpulkan bahwa Kepala Desa sebagai penentu arah dalam perencanaan belum terlaksana dengan baik.
- b. Pada desa Kota bangun, Kepala Desa selaku pimpinan organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak diluar organisasi masih terdapat kelemahan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kurangnya pertemuan-pertemuan dengan pihak luar desa.
- c. Pada Desa kota bangun, Kepala Desa penggerak yang efektif dapat dikatakan kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari :
 - a. Interaksi terhadap bawahan didalam Kantor sebenarnya sudah dapat dikatakan baik, akan tetapi interaksi di dalam Kantor Desa kota bangun kurang berusaha kedekatan personal dengan bawahannya dalam upaya menciptakan keharmonisan dan suasana kerja yang nyaman bagi bawahannya.
 - b. Kepala Desa mampu mengkomunikasi dengan baik setiap hal yang menjadi arahan dan informasi terhadap bawahannya sehingga bawahannya mengerti setiap instruksi yang diberikan oleh Kepala Desa.

- d. Pada Kantor kota bangun, Kepala Desa selaku pengawas, khususnya dalam hubungan dengan masyarakat, terutama dalam menangani situasi perbedaan pendapat yang terjadi ditengah masyarakat dapat dikatakan kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari Kepala Desa yang belum peka apabila terjadi perbedaan pendapatg kepada masyarakatnya hal ini membuat setiap masalah yang ada di masyarakatnya akan sulit untuk diselesaikan oleh Kepala Desa, contohnya yaitu perbedaan pendapat antar masyarakat sehingga kegiatan-kegiatan serta pemberdayaan yang lainnya menjadi terhambat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Kepemimpinan Desa Kota Bangun dapat di katagorikan baik, pada indikator perencanaan yang baik yang akan ditempuh dalam usaha pencapaian tujuan (stategi dan taktik, serta mengambil keputusan), serta fungsi dalam komunikator yang efektif (memiliki interaksi yang baik terhadap bawahan) yakni kepala desa mengetahui program yang akan dijalankan seperti pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)
2. Sedangkan untuk analisa Kepemimpinan kota bangun juga terdapat beberapa fungsi kurang dijalankan dengan baik yaitu fungsi pimpinan selaku pengorganisasian dalam hal tujuan dari program pemberdayaan kesejahteraan sosial PKK sehingga program tersebut belum dijalankan dengan optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Berdasarkan perencanaan di harapkan agar Kepala Desa mampu menjelaskan kepada masyarakat bahwa pemberdayaan hal yang sangat

berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Kota Bangun. Sehingga kesadaran masyarakat tentang pemberdayaan lebih luas, terbuka dan meningkat.

2. Kepala Desa sebagai pengorganisasian diharapkan memiliki jadwal tetap untuk turun kelapangan dan mulai membangun komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat yang ia pimpin serta dengan berbagai pihak diluar kantor Desa agar Kepala Desa mengetahui apa yang menjadi harapan masyarakat selama ini.
3. Kepala desa sebagai pengawas harus mampu menyelesaikan perbedaan pendapat antar masyarakat yang ada di Desa kota bangun mengenai pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) yang saat ini tidak berjalan lagi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta ; Graha Ilmu
- Chaidir, Ellydar. 2008. *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-undang Dasar 1945*. Yogyakarta: Total Media
- Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Himawan Pambudi. 2001. *Politik Pemberdayaan, Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*. Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama.
- Kartono, Kartini. 2011. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Pos.
- Kencana Syafiie, Inu. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: PT Reflika Aditama.
- Kencana Syafiie, Inu. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Kencana Syafiie, Inu. 2008. *Perbandingan Pemerintahan*. Bandung. PT Reflika Aditama.
- Kencana Syafiie, Inu. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Reflika Aditama,
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Ndara, Taliziduhu. 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndara, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetya, Bambang dan dkk. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*. Tangerang: CV Media Berlian.
- Swatno, dkk. 2011. *Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Mifta. 2012. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pos.
- Usman, Husnaini., Et.al. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Arkasa.
- Wasistiono, Sadu., dkk. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV Fokusmedia.
- Widjaja, HAW. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zulkifli., Et.Al. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru; Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undnag Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonseia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

C. Dokumentasi

Kasmini. 2009. *Peranan Penghulu dalam Membina Keamanan dan Ketertiban di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir*. Skripsi. Pekanbaru: Jurusan Ilmu Pemerintahan.

Syahyaruddin. 2009. *Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa (2006-2008) Bidang Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban di Desa Pengadh Kecamatan Bungaran Timur Laut Kabupaten Natuna*. Skripsi. Pekanbaru: Jurusan Ilmu Pemerintahan.

Usman, Syahrin. 2011. *Peranan Camat Sebagai Koordinator Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir*. Skripsi. Pekanbaru: Jurusan Ilmu Pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Awang, dan Mahendra Wijaya. 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Chaidir, Ellydar. 2008. *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-undang Dasar 1945*. Yogyakarta: Total Media
- Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kartono, Kartini. 2011. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Pos.
- Kencana Syafiie, Inu. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: PT Reflika Aditama.
- _____. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: CV Mandar Maju.
- _____. 2008. *Perbandingan Pemerintahan*. Bandung. PT Reflika Aditama.
- _____. 2011. *Ekologi Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- _____. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Reflika Aditama,
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Ndara, Taliziduhu. 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetya, Bambang dan dkk. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*. Tangerang: CV Media Berlian.
- Swatno, dkk. 2011. *Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Mifta. 2012. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pos.
- Usman, Husnaini., Et.al. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Arkasa.
- Wasistiono, Sadu., dkk. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV Fokusmedia.
- Widjaja, HAW. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zulkifli., Et.Al. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru; Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undnag Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonseia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

C. Dokumentasi

Kasmini. 2009. *Peranan Penghulu dalam Membina Keamanan dan Ketertiban di Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir*. Skripsi. Pekanbaru: Jurusan Ilmu Pemerintahan.

Syahyaruddin. 2009. *Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa (2006-2008) Bidang Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban di Desa Pengadh Kecamatan Bungaran Timur Laut Kabupaten Natuna*. Skripsi. Pekanbaru: Jurusan Ilmu Pemerintahan.

Usman, Syahrin. 2011. *Peranan Camat Sebagai Koordinator Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir*. Skripsi. Pekanbaru: Jurusan Ilmu Pemerintahan.